

**PASAR BISNIS RITEL ALFAMART; STUDY KAJIAN EKONOMI POLITIK
DI KABUPATEN GOWA**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar
Sarjana Ilmu Politik Jurusan Ilmu Politik pada Fakultas
Ushuluddin, Filsafat, dan Politik
UIN Alauddin Makassar

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

Oleh:

MILDA SARI
NIM: 30600115013

**FAKULTAS USHULUDDIN, FILSAFAT DAN POLITIK
UIN ALAUDDIN MAKASSAR**

2020

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini,

Nama : Milda Sari

NIM : 30600115013

Tempat/Tgl. Lahir : Tanjung Redeb, 11 Oktober 1996

Jurusan : Ilmu Politik

Fakultas : Ushuluddin Filsafat dan Politik

Alamat : Btn Griya Darussalam Pattalassang

Judul : Pasar Bisnis Ritel Alfamart; Studi Kajian Ekonomi Politik Di Kabupaten Gowa

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran, bahwa skripsi ini benar ada;ah hasil karya sendiri. Jika kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seutuhnya maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Samata-Gowa, Januari 2021

Penyusun,

Milda Sari

NIM. 30600115013

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul **"Pasar Bisnis Ritel Alfamart; Studi Kajian Ekonomi Politik di Kabupaten Gowa"** yang disusun oleh **Milda Sari**, NIM: **30600115013**, mahasiswa Prodi Ilmu Politik, pada Fakultas Ushuluddin, Filsafat dan Politik UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertanggung jawabkan pada sidang *munaqasyah* yang diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 21 Januari 2021 M bertepatan dengan 02 Jumadil Akhir 1442 H, dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Sosial (S. Sos) Prodi Ilmu politik pada Fakultas Ushuluddin, Filsafat dan Politik UIN Alauddin Makassar dengan beberapa perbaikan.

Samata, 21 Januari 2020 M
02 Jumadil Akhir, 1442 H

DEWAN PENGUJI

Ketua : Dr. Abdullah, S.Ag., M.Ag.
Sekretaris : Nur Utaminingsih, S.IP., M.Si
Munaqasyah I : Prof.Dr.H.Muhammad Ramli, M.Si.
Munaqasyah II : Dr. H Muhammad Ali, M.Ag
Pembimbing I : Dr. Anggriani Alamsyah, S.IP., M.Si
Pembimbing II : Fajar S.Sos., M.Si

Diketahui oleh:

Dekan Fakultas Ushuluddin, Filsafat dan Politik
UIN Alauddin Makassar

Dr. Muhsin Mahfudz., M.Th
NIP. 19711125 199703 1 001

KATA PENGANTAR

Assalamu'Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Dengan menyebut nama Allah SWT yang maha pengasih dan maha penyayang, segala puji bagi Allah SWT Tuhan seru sekalian alam. Tiada kata yang mampu mewakili rasa syukur atas segala nikmat yang tercurah selama ini. Nikmat iman, nikmat ilmu, nikmat kesehatan, nikmat kasih sayang dan begitu banyak nikmat Allah SWT, yang jika dituangkan dalam sebuah tulisan maka niscaya tidak akan cukup air lautan untuk menjadi tintanya dan tak akan cukup pepohonan di bumi ini untuk menjadi penanya. Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarga dan para sahabatnya, yang saleh hingga umat islam sampai akhir zaman, Amin.

Penulis telah berusaha semaksimal mungkin untuk menghasilkan karya terbaik dalam penulisan skripsi dengan judul “Dominasi Pasar Bisnis Ritel Alfamart; Study Kajian Ekonomi Politik Di Kabupaten Gowa.” Hal ini guna memenuhi persyaratan dalam penyelesaian pendidikan S1 Jurusan Ilmu Politik pada Fakultas Ushuluddin, Filsafat dan Politik UIN Alauddin Makassar. Namun demikian dengan segala kerendahan hati penulis mengakui bahwa skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan. Agar penulisan skripsi ini menjadi lebih baik, penulis sangat mengharapkan masukan, kritikan dan saran yang membangun dari pihak manapun.

Selesainya seluruh kegiatan penulisan skripsi ini, tidak terlepas dari bantuan yang diberikan berbagai pihak, baik moril maupun materil. Terutama dari kedua orang tua yang doanya tidak pernah putus menemani perjuangan dalam meraih cita dan cinta dalam hidup, skripsi ini penulis persembahkan kepada kedua orang tua penulis Sakkadan Tuti atas segala hal yang tidak bisa ananda balas dengan

apapun,juga kepada saudara-saudari Kak Hasna Wati, Desi Ratna, Muh. Ismail, Jumadil. penulis serta segenap keluarga yang selalu mendukung dalam setiap perjuangan. Perkenankan pula penulis memberikan penghargaan dan ucapan terima kasih sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

1. Prof. Drs. Hamdan JuhannisM.A,Ph.D selaku Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Prof. Dr. Mardan, M.Ag selaku wakil Rektor I bidang akademik pengembangan lembaga,Dr.Wahyuddin,M.Hum. selaku wakil Rektor II bidang administrasi umum dan perencanaan keuangan, Prof.Dr.Darussalam, M. Ag selaku wakil Rektor III bidang kemahasiswaan,Prof.H.Kamaluddin Abunawas,M.Ag selaku wakil Rektor IV bidang kerjasama dan pengembangan lembaga.
2. Dr.Muhsin,.M.Th.I selaku Dekan Fakultas Ushuluddin, Filsafat dan Politik beserta jajarannya.
3. Syahrir karim, M. Si., Ph. D selaku Ketua Jurusan Ilmu Politik, dan Nur Utaminingsih, S.IP, M.Si. selaku sekretaris jurusan Ilmu Politik.
4. Dr. Anggriani Alamsyah, M.Siselaku pembimbing I, dan Fajar, S.Sos., M.Siselaku pembimbing II yang selalu memberi masukan yang konstruktif dan sangat membangun dalam penulisan skripsi ini.
5. Prof. Dr. H. Muhammad Ramli, M.Siselaku penguji 1 dan Dr. H. Muhammad Ali, M. Ag selaku penguji II Yang telah banyak memberikan masukan, saran dan nasehat demi terselesainya penulisan skripsi ini.
6. Dosen jurusan Ilmu politik yang senantiasa memberi ilmu pengetahuan yang berharga dan sangat bermanfaat bagi penulis.Serta staf jurusan Ilmu Politik dan staf Tata Usaha Fakultas Ushuluddin, Filsafat dan Politik yang sangat

membantu dalam berbagai urusan administrasi selama perkuliahan hingga penyelesaian skripsi ini.

7. Kepala perpustakaan dan segenap staf perpustakaan pusat UIN Alauddin Makassar yang telah menyiapkan literatur dan memberikan kemudahan untuk dapat memanfaatkan secara maksimal demi penyelesaian skripsi ini.
8. Kepada sahabat-sahabat seperti saudara penulis, yang senantiasa mendukung dan menyemangati penulis seluruh teman-teman kelas Ilmu Politik I/2, senior-senior Ilmu Politik yang telah memberikan motivasi dalam menjalani program selama kuliah. Teman-teman satu kost yang selalu ada untuk penulis baik dalam keadaan sedih maupun senang, teman-teman kuliah kerja nyata yang selalu memberikan dukungan sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.
9. Terima kasih juga penulis sampaikan kepada keluarga dan teman-teman yang tidak sempat penulis tuliskan namanya satu-persatu. Karena telah kebersamai selama menempuh pendidikan pada perguruan tinggi.

Semoga amal kebajikan semua pihak yang telah membantu diterima disisi-Nya dan diberikan pahala yang berlipat ganda sesuai dengan amal perbuatannya. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya, serta bagi para pembaca pada umumnya. *Amin Ya Rabbal 'Alamin.*

Samata,

Penyusun,

Milda Sari

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vii
ABSTRAK.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tinjauan dan Kegunaan Penelitian.....	10
1. Tujuan Penelitian.....	11
2. Kegunaan Penelitian.....	11
D. Tinjauan Pustaka.....	11
BAB II TINJAUAN TEORITIS.....	19
A. Ekonomi Politik.....	19
B. Ekonomi Kelembagaan.....	20
C. Kebijakan Publik.....	22
D. Pembangunan.....	26
BAB III METODE PENELITIAN.....	30
A. Jenis dan Lokasi Penelitian.....	30
B. Sumber Data.....	30
C. Metode Pengumpulan Data.....	31

D. Instrumen Penelitian.....	32
E. Informan.....	33
F. Analisis Data.....	33
G. Teknik Pengumpulan Data.....	34
H. Pengujian Keabsahan Data.....	36
BAB IV HASIL PENELITIAN.....	38
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	38
B. Profil Alfamart.....	45
C. Kondisi Alfamart.....	48
D. Dampak Ekonomi dan Politik Alfamart di Kabupaten Gowa Tentang Alfamart...	59
BAB V PENUTUP.....	60
A. Kesimpulan.....	60
B. Implikasi Penelitian.....	61

ABSTRAK

Nama : Milda Sari

NIM : 30600115013

Prodi : Ilmu Politik

**Judul : Pasar Bisnis Ritel AlfaMart; Study Kajian Ekonomi Politik di
Kabupaten Gowa**

Skripsi ini mengkaji tentang Dominasi Pasar Bisnis Ritel Alfamart; Studi Kajian Ekonomi Politik di Kabupaten Gowa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pola dan bagaimana pasar ritel Alfamart di kabupaten gowa melalui pandangan dari masyarakat, pemerintah, dan orang-orang di dalam Alfamart itu sendiri juga sebagai suatu hal yang menarik untuk ditelusuri lebih lanjut.

Seiring dengan berkembangnya zaman yang semakin modern ini menyebabkan banyaknya persaingan di dunia bisnis, termasuk bisnis ritel. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya pasar modern yang bermunculan dengan berbagai macam bentuk dan ukuran, sehingga keberadaan pasar tradisional mulai bergeser. Penjualan eceran adalah meliputi semua aktivitas yang melihat penjualan barang dan jasa pada konsumen akhir untuk dipergunakan yang sifatnya pribadi dan bukan bisnis.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif, dengan menggunakan metode pengumpulan data Primer dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Serta metode pengumpulan data sekunder yang dilakukan melalui kajian pustaka berupa buku, skripsi, jurnal, dan internet yang berkaitan dengan judul penelitian. Dalam penelitian ini menggunakan 4 teori antara lain: Teori Ekonomi Politik, Teori Ekonomi Kelembagaan, Teori Kebijakan Publik, Teori Pembangunan.

Dan dari hasil penelitian ini, Kehadiran pasar modern atau minimarket ini sangat besar dan sangat membantu perekonomian di kabupaten Gowa itu sendiri. Namun ada juga Dampak Negatif yang didapat atas berdirinya Minimarket yakni Alfamart membuat munculnya persaingan antara Toko Modern dengan pedagang Kecil.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah salah satu negara yang menganut sistem demokrasi yang tinggi, pemilu merupakan jantung dari demokrasi masyarakat bebas memilih siapa yang akan jadi pemimpinnya. Pemilu di Indonesia baru dimulai pada tahun 2004 dan telah melahirkan banyak pemimpin yang sukses. Sedikit demi sedikit pemilu di Indonesia berkembang mulai dari pemilihan umum presiden, gubernur, dan walikota/bupati, serta bahkan pemilu sudah masuk ke desa dengan diadakannya pemilihan kepala desa. Perkembangan politik di Indonesia menyebabkan banyak strategi-strategi yang dipakai oleh aktor politik untuk memenangkan suatu pemilihan kepala daerah. Berbicara tentang pemimpin dan kepemimpinan masa depan, erat kaitannya dengan kualitas sumber daya manusia yang dimiliki oleh bangsa ini. Bangsa ini masih membutuhkan pemimpin yang kuat di berbagai sektor kehidupan masyarakat, pemimpin yang berwawasan kebangsaan dalam menghadapi permasalahan bangsa yang demikian kompleks.¹ Pelaksanaan Otonomi Daerah di Indonesia yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

¹ Andi Fajar Ferdiansyah, Politik Pembangunan (Studi terhadap pembangunan Kawasan Industri Bantaeng di Kecamatan Pa'jukukang Kabupaten Bantaeng), Skripsi, Makassar: Fakultas Ushuluddin Filsafat dan Politik Universitas Alauddin Makassar, 2019, h. 1

Pemerintahan Daerah². Dimana pemerintah provinsi, kabupaten dan kota memiliki kepala daerah sebagai kepala pemerintahan.

Kepala daerah provinsi disebut gubernur, kepala daerah kabupaten disebut bupati dan kepala daerah kota disebut walikota yang semuanya dipilih langsung oleh rakyat. Salah satu semangat dari pelaksanaan otonomi daerah di mana rakyat berpartisipasi dalam pelaksanaan kehidupan berdemokrasi. Kabupaten Gowa sebagai salah satu daerah di Indonesia yang dalam penerapan sistem otonomi daerah telah mendorong terjadinya dinamika kepemimpinan politik di kabupaten tersebut. Rakyat dalam sistem otonomi daerah berhak memilih pemimpin untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan daerahnya. Penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia saat ini, memperlihatkan kenyataan bahwa setidaknya sejumlah pemimpin lokal telah membuktikan keberhasilan mengelola permasalahan kehidupan masyarakat yang terjadi pada daerahnya.

Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah adalah salah satu landasan yuridis bagi pengembangan otonomi daerah di Indonesia.³ Undang-undang ini disebutkan bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar tahun 1945, pemerintahan daerah yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, diarahkan untuk mempercepat

²Undang-Undang No.32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

³Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 *tentang Pemerintahan Daerah*.

terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat.

Hal ini sesuai dengan ayat yang menjelaskan tentang pembangunan Allah berfirman dalam Qs As-Sajadah/32:24 sebagai berikut :

وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أُمَمًا يَهْتَدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ ٢٤

Terjemahnya :

“Dan kami jadikan diantara mereka itu pemimpin pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah kami ketika mereka sabar. Dan adalah meyakini ayat kami”.⁴

Penjelasan dari As-Sajadah adalah bahwa manusia haruslah selalu mensyukuri atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah swt. tentunya nikmat tersebut senantiasa kita jaga kita rawat dan kita lestarikan agar kelak nanti anak cucu kita masih dapat menikmati atas apa yang telah diberikan-Nya. Tiap-tiap pemerintah daerah mengupayakan pembangunan guna meningkatkan pendapatan bagi setiap sektor di daerahnya. Serta merencanakan pembangunan tata daerahnya yang dapat bermanfaat bagi semua lapisan masyarakat dalam sektor ekonomi politik. Dalam sector politik dan kebijakan harus seimbang, dan disini juga mengatur penataan pasar yakni memboboti presiden dalam penataan yaitu non diskriminasi.

⁴Kementrian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahan*. (Depok: Sabiq, 2009). h. 663.

Seperti halnya HR.Al-Bukhari yang menjelaskan tentang Pembangunan yang Berbunyi :

حَدَّثَنَا عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ مُعَلَّى بْنِ
أَسَدٍ حَدَّثَنَا وَهَيْبُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخَذَ أَحَدُكُمْ أَحْبَلًا فَيَأْخُذُ حُزْمَةً مِنْ
حَطَبٍ فَيَبِيعُ فَيَكْفَى اللَّهُ بِهِ وَجْهَهُ خَيْرٌ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ النَّاسَ أُعْطِيَ أَمْ مُنِعَ
(أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ)

Artinya:

Diberitakan kepada kami Mua'llaibn Asad, diberitakan kepada kami Wuhaib, dari Hisyam, dari ayahnya, dari az-Zubair ibnal-Awwamr.a, dari Nabi saw. bersabda: “Sungguh alangkah baik jika salah seorang diantara kalian (umatku) yang mencari seikat kayu bakar dan mengikatnya kemudian memikulnya dan menjualnya dengan membuka wajah (tanpa rasa malu} karena Allah, daripada meminta-minta kepada orang lain baik diberi maupun tidak. (HR. Al-Bukhari)”⁵

Hadis di atas menekankan akan pentingnya untuk berusaha. Ada hadits lain yang menguatkan pentingnya setiap mu'min untuk mempunyai mata pencaharian, Rasulullah Saw. bersabda: “Usaha yang halal merupakan fardhu (wajib) bagi setiap mu'min” (HR. Al-Bukhari). Lantas apa kaitannya dengan pembangunan ekonomi?

Salah satu pilar dalam pembangunan ekonomi adalah pembangunan yang bertumpu pada pembangunan manusia yang semuanya dalam kerangka ibadah kepada Allah Swt. Disini juga menekankan agar tidak untuk meminta-minta, maksudnya

⁵Imam Al-Bukhari, *Buku Shaikh Al-Bukhari Jilid 1* (Jakarta: Pustaka As-Sunnah), 2015, h. 68.

disinibekerja memberikan ruang penataan, memberdayakan kesejahteraan masyarakat Hal ini seperti mempertegas bahwa kemalasan merupakan pangkal dari kemiskinan. Apalagi banyak hadits yang menjelaskan bahwa Rasulullah Sawsendiri sering berdoa agar terlindung dari sifat malas dan kemiskinan. Malas, miskin, dan kebodohan akan menjerumuskan manusia pada kehinaan. Bagaimana mungkin suatu peradaban dibangun atas kekurangan-kekurangan tersebut?

Daerah dapat berprakarsa sesuai dengan potensi daerah yang dimiliki dan dapat mengembangkan semua yang menjadi potensi daerah dalam rangka memajukan kesejahteraan rakyat dengan tetap mengedepankan kepentingan menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Pembentukan daerah juga pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat, pelaksanaan pembangunan perekonomian daerah, pengelolaan potensi daerah, dan peningkatan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah sesuai dengan pertumbuhan kehidupan demokrasi nasional.⁶ Sebagai langkah awal daerah otonom baru adalah dengan berusaha mewujudkan distribusi pertumbuhan ekonomi yang yang serasi dan merata antar daerah, mewujudkan distribusi kewenangan yang sesuai dengan kesiapan pemerintah dan masyarakat lokal, menciptakan ruang politik bagi pemberdayaan dan partisipasi politik institusi-institusi politik lokal, serta mewujudkan distribusi layanan public yang mudah dijangkau oleh masyarakat, dan

⁶ Sadu Wasistiono, Ms, *Pemaparan Lanjutan Suplemen Penelitian Studi Kelayakan Pemekaran Wilayah Tangerang Selatan*, (Ciputat: pemerintah Daerah kabupaten Tangerang, 2007), hal. 2.

meningkatkan efektifitas dan efisiensi fungsi pemerintahan daerah. Pesatnya perkembangan Industri ritel di Indonesia, mendorong Pemerintah untuk mengeluarkan peraturan dalam rangka penataan Industri tersebut.

Aktivitas perdagangan salah satu cara manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang beranekaragam. Aktivitas Jual beli yang dilakukan di pasar. Peraturan yang diterbitkan antara lain Peraturan Presiden No. 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern. Pengertian toko modern menurut pasal 1 angka 5 Perpres 112/2007 adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk Minimarket, Supermarket, Department Store, Hypermarket maupun Grosir.⁷ Selanjutnya dalam rangka memberi petunjuk pelaksanaan peraturan tersebut, Pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53/M-DAG/PER/12/2008 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern pada tanggal 12 Desember 2008. Pertumbuhan pasar ritel modern terutama minimarket berjangkauan yang cukup signifikan di Kota Makassar, Gowa, dan Maros, dengan lokasi yang strategis ditengarai mengancam kelangsungan usaha pasar tradisional dan usaha ritel kecil (toko klontong). Berdasarkan permasalahan tersebut, Kantor Perwakilan Daerah merasa perlu melakukan audiensi dengan pemerintah daerah, dalam hal ini Bupati Kabupaten

⁷ Peraturan Presiden 112 tahun 2007

Gowa terkait kebijakan daerah Kabupaten Gowa tentang perlindungan, pemberdayaan pasar tradisional, dan penataan pasar modern di Kabupaten Gowa.⁸

Seiring dengan berkembangnya zaman yang semakin modern ini menyebabkan banyaknya persaingan di dunia bisnis, termasuk bisnis ritel. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya pasar modern yang bermunculan dengan berbagai macam bentuk dan ukuran, sehingga keberadaan pasar tradisional mulai bergeser. Penjualan eceran adalah meliputi semua aktivitas yang melihat penjualan barang dan jasa pada konsumen akhir untuk dipergunakan yang sifatnya pribadi dan bukan bisnis.⁹

Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Retail Indonesia (Aprindo) Roy N. Mandey mengatakan penutupan gerai ritel terkait dengan perubahan model bisnis, saat ini industri ritel yang paling berkembang jenis minimarket. Pertumbuhan minimarket itu di atas 15% pertahun. Industri ritel terus mengikuti perubahan teknologi. Dari 400 anggota Aprindo yang memiliki sekitar 40.000 gerai, sebanyak 90% telah mengadopsi perdagangan lewat online. Tahun 2018 sangat mengapresiasi pemerintah karena industri ritel mengalami pertumbuhan cukup signifikan yakni pertumbuhan industri ritel selama 2017 sekitar 9-10%. Sebelumnya, pada 2014 akhir

⁸ Peraturan Menteri Perdagangan No. 53/M-DAG/PER/12/2008 Tahun 2008 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern-“Permendag Nomor 53 Tahun 2008

⁹ Djasmin Saladin, *Manajemen Pemasaran*, (Cet. IV; Bandung: Linda Karya, 2006), h 11

hingga 2015, saat inflasi berada di angka 7-%, industri retail mulai redup. Bahkan pada 2017, pertumbuhan 7%.¹⁰

Wilayah Jawa masih memberikan kontribusi terbesar bagi Indonesia. Total Grocery sebesar 69,5%, sementara wilayah Kalimantan mencapai pertumbuhan tertinggi 3,4% dibandingkan wilayah lain. Alfamart market share stabil pada 31,1% terhadap Indonesia Modern Trade Minimarket. Sementara Alfamidi market share tumbuh dari 5,2%. Group Alfamart market share mencapai 36,5%.¹¹

Pemilihan lokasi yang tepat dapat menentukan keberhasilan sesuatu bisnis. Pada lokasi yang tepat, sebuah gerai akan lebih sukses dibandingkan gerai lainnya yang berlokasi kurang strategis meskipun keduanya menjual produk yang sama, oleh pramuniaga yang sama banyak dan terampil. Apabila lokasi strategis, maka dapat dijangkau konsumen dengan mudah dan dapat menimbulkan kepuasan tersendiri. Ma'aruf menyatakan bahwa lokasi adalah faktor yang sangat penting dalam bauran pemasaran ritel.¹²

Menjamurnya minimarket merupakan tantangan bagi pengusaha minimarket yakni Alfamart di wilayah Makassar khususnya daerah Sungguminasa, kabupaten

¹⁰KataData.co.id, Diakses Pada Tanggal 27 Januari 2019 Pada Pukul 11.51 WIB.<https://katadata.co.id/opini/2019/01/27/retail-minimarket-masih-tumbuh-1000-gerai-tiap-tahun>

¹¹PT. Sumber Alfaria Trijaya Tbk. Dan Entitas Anaknya Diposting Pada Tanggal 31 Oktober 2018.https://www.idx.co.id/Portals/0/StaticData/ListedCompanies/Corporate_Actions/New_Info_JSX/Jenis_Informasi/01_Laporan_Kuangan/02_Soft_Copy_Laporan_Kuangan//Laporan%20Keuangan%20Tahun%202018/TW3/AMRT/AMRTLKTWIII2018.pdf.

¹² Elien Nira Permata Sari, "Pengaruh Kualitas Pelayanan, Persepsi Harga dan Lokasi Terhadap Keputusan Pembelian pada Pelanggan Minimarket (Studi Kasus Pada Pelanggan Minimarket Alfamart Tayu Wetan, Tayu, Pati, Jawa Tengah)", *Skripsi*, Yogyakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Yogyakarta, 2017, h. 5

Gowa. Untuk setiap perusahaan harus mencari strategi penjual agar dapat merebut hati pembeli. Mulai dari perencanaan produk, penetapan harga, strategi promosi, segmentasi pasar, diferensiasi produk dan dilakukan dengan tepat. Sehingga tidak mudah bagi Alfamart untuk mengembangkan bisnis minimarketnya ditengah persaingan yang kompetitif.

Wilayah kabupaten Gowa terdiri dari 18 kecamatan dan 116 kelurahan dengan luas sekitar 1.883.33 kilo meter.¹³ Pembangunan Alfamart di Gowa sangat kurang, hanya ada beberapa di setiap kecamatan. Yakni Somba Opu hanya ada 3 alfamart yaitu berlokasi di jalan syekh yusuf dan di jalan antang raya.

Kepimpinan dan ekonomi politik yang akan membawa perubahan yang lebih, maka dari itu perlu di bahas kebijakan pemerintah yang terjadi di Indonesia terkhusus peraturan daerah yang ada di Gowa sebagai daerah dan objek peneliti. Hal ini diperlukan sebagai bahan evaluasi untuk melihat Kebijakan Pemerintah terhadap Pembangunan seperti apa yang sesuai dengan segala permasalahan yang dihadapi bangsa Indonesia saat ini dan dimasa depan. Fenomena Pembangunan kawasan Alfamart sebagai Politik pembangunan, menarik simpatik masyarakat dengan sosialisasi yang baik, dan pengambilan kebijakan yang sangat beda dari kepemimpinan kepala-kepala daerah lainnya menjadi dasar pertimbangan untuk menjadikan ***“Dominasi Pasar Bisnis Retail Alfamart ; Studi kajian Ekonomi Politik di Kabupaten Gowa Sulawesi Selatan”*** sebagai judul skripsi.

¹³ BPS (Badan Pusat Statistik) Kabupaten Gowa Tahun 2019

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus

1. Fokus Penelitian

Dalam karya tulis ini, Peneliti focus pada Kondisi Real Pasar Bisnis Ritel Alfamart di Kabupaten Gowa.

2. Deskripsi Fokus

Dalam kajian ini peneliti focus pada Dampak Ekonomi dan Politik terhadap Pasar Bisnis Ritel Alfamart di Kabupaten Gowa.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan suatu masalah yaitu:

1. Bagaimana kondisi pasar bisnis ritel Alfamart di Kabupaten Gowa?
2. Bagaimana dampak Ekonomi dan Politik pasar bisnis ritel Alfamart di Kabupaten Gowa?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan

a. Tujuan Penelitian ini yaitu:

- 1) Untuk mengetahui bagaimana dominasikondisi pasar bisnis ritel alfamart di Kabupaten Gowa
- 2) Untuk mengetahui bagaimana dampak ekonomi dan politik pasar bisnis ritel alfamart di Kabupaten Gowa

2. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat, baik secara teoritis maupun secara praktis:

a. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan kepada para pembaca dan peneliti mengenai donasi pasar bisnis ritel Alfamart di Gowa, Sulawesi Selatan.

b. Kegunaan Praktis

Secara Praktis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat bagi penulis, masyarakat maupun pemerintah. Penulis, untuk menambah pengetahuan bagi peneliti tentang Dominasi Pasar Bisnis Ritel Alfamart di Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan. Dan mengembangkan pemikiran peneliti tentang ekonomi politik di Gowa, Sulawesi Selatan. Masyarakat, memberi pemahaman bagi masyarakat luas tentang kinerja dan kebijakan pemerintah. Pemerintah, sebagai bahan pertimbangan dan tinjauan bagi pemerintah tentang kebijakan perda di Kabupaten Gowa.

E. Tinjauan Pustaka

Penulisan skripsi dengan tema Donasi Pasar Bisnis Ritel Alfamart sangat baik menjadi tolak ukur bagi penelitian ini. Hal ini membuat peneliti mengambil judul Ekonomi Politik Kabupaten Gowa Terhadap pembangunan Alfamart.

Dari uraian diatas, peneliti tertarik untuk menulis karya ilmiah yang terkait dengan Ekonomi Politik dan Kebijakan Ritel, membuat peneliti tertarik untuk mengkajinya. Penulis juga meninjau beberapa hasil penelitian, sehingga nantinya tidak terjadi pengulangan penelitian. Adapun referensi yang dapat dijadikan peneliti sebagai tambahan rujukan, yaitu :

1. Penelitian dilakukan oleh Penelitian ini di lakukan Oleh Muh.Ismail “Kinerja Politik pemerintah Desa (Studi terhadap Perbaikan jalan Desa di Desa Barayya Kecamatan Bontoromba Kabupaten Jeneponto)”¹⁴

Skripsi ini mengkaji tentang Kinerja Politik Pemerintahan Desa (studi terhadap perbaikan jalan desa di desa Baraya Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jnepeonto). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Bagaimana Dinamika Politik Perbaikan Jalan desa di Desa Baraya, Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto, dan Apa faktor penghambat dalam perbaikan jalan desa di Desa Baraya Kecamatan Bontoramba Kabupaten Jeneponto. Penelitian ini menggunakan metode penlitian deskripsi kualitatif dengan pengumpulan data secara primer yaitu melalui observasi, wawancara, dokumentasi dan secara sekunder yaitu kajian pustaka melalui buku, jurnal, laporan tahunan dan situs internet yang terkait topik penelitian. Hasil penelitian menggambarkan bahwa kinerja kepala desa dalam pembangunan infrastruktur jalan belum maksimal, kondisi ini diketahui dari banyaknya

¹⁴Muh.Ismail “Kinerja Politik pemerintah Desa (Studi terhadap Perbaikan jalan Desa di Desa Barayya Kecamatan Bontoromba Kabupaten Jeneponto). Skripsi (Makassar,UINAM, 2015)

keluhan dari masyarakat akan kinerja kepala desa. Selanjutnya mengenai faktor yang menghambat kinerja pembangunan infrastruktur jalan di desa Baraya yaitu kurangnya perhatian dari birokrasi desa serta faktor lain itu faktor kesehatan yang dialami oleh kepala desa Baraya selama menjabat sebagai kepala desa sering terganggu sehingga kepala desa kurang bisa mengkoordinir bawahannya sehingga kurang maksimal dalam memimpin desa Baraya, serta tidak tersedianya lahan/tanah atau masyarakat yang enggan memberikan seikit lahan/tanah mereka untuk di gunakan sebagai pembuatan/perbaikana jalan desa. Sedangkan faktor pendukungnya yaitu masyarakat yang antusias membantu dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur.

2. Penelitian dilakukan oleh Sitti Aminah "Negara dan Kesejahteraan (Analisis Ekonomi Politik Terhadap Hubungan Petani dengan PT. Surya Lestari II di Desa Waiputeh Kabupaten Mamuju Tengah).¹⁵

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa relasi sosial yang terjalin antara Petani sawit dengan PT.Surya Lestari II awalnya saling mendukung, petani memberikan tanah mereka kepada perusahaan sedangkan perusahaan harus memberikan modal kepada petani tetapi dalam perkembangannya hubungankerjasama tersebut, menimbulkan masalah bagi petani yaitu tingginya standartandah buah segar (TBS) yang di tetapkan PT. Surya Lestari

¹⁵ Siti Aminah, "Negara dan Kesejahteraan (Analisis Ekonomi Politik Terhadap Hubungan petanni dengan PT. Surya Lestari II di Desa Waiputeh Kabupaten Mamuju Tengah" Skripsi, (Makassar, UINAM, 2017)

II sehingga petanimerasa dirugikan dan banyak lahan yang belum layak untuk dikonversikan. Melihat hal ini pemerintah segera membentuk program intensifikasi dan ekstensifikasi, membentuk panitia khusus (pansus) tanda buah segar (TBS), serta membentuk aturan tentang kelayakan lahan untuk dikonversi. Implikasi penelitian ini adalah (1) Bersama petani maupun PT. Surya Lestari II harus duduk kembali untuk memperkuat komitmen bersama yang didasari oleh keperluan saling memerlukan, menguatkan dan saling menguntungkan yang merupakan inti yang paling mendasar dalam membangun hubungan sosial. (2) pemerintah dalam mengembangkan pertanian tidak semata-mata mengejar keuntungan ekonomi tetapi hendaknya mengedepankan kehidupan ekonomi sosial petani demi terwujudnya kesejahteraan bersama, khususnya masyarakat (petani).

3. Penelitian ini dilakukan oleh Mutiara Aliefty Octavina “Kepemimpinan Bupati dalam Meningkatkan Pembangunan”(Studi tentang Kepemimpinan Bupati di Kabupaten Bangkalan 2003-2013)”¹⁶
 Penelitian ini dilakukan untuk melakukan suatu pemaparan terkait dengan gaya kepemimpinan yang diterapkan, dalam hal ini mengenai kemampuannya untuk memimpin, di pihak lain ada orang yang mempunyai kelebihan kemampuan untuk memimpin. Di sinilah timbulnya kebutuhan akan pemimpin dan kepemimpinan. Sebagai permasalahan dalam penelitian ini

¹⁶ Mutiara Aliefty Octavina “Kepemimpinan Bupati dalam Meningkatkan Pembangunan”(Studi tentang Kepemimpinan Bupati di Kabupaten Bangkalan 2003-2013). Jurnal (Malang : Brawijaya, 2017)

yaitu mengenai bagaimanakah kepemimpinan Kepala Daerah di Kabupaten Bangkalan dalam meningkatkan pembangunan dan faktor-faktor apakah yang mempengaruhi kepemimpinan Bupati Bangkalan dalam meningkatkan pembangunan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian deskriptif. Hasil penelitian ini adalah dalam proses pengambilan keputusan, Bupati selalu melakukan dengan cara yang transparan, sehingga dapat memenuhi segala bentuk aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat. Dalam penetapan kebijakan, Bupati selalu terbuka terhadap kritik dan saran, selain itu juga memberikan penghargaan kepada pihak-pihak yang memiliki prestasi kerja yang baik. Berdasarkan hasil penelitian juga didapatkan bahwa dalam mengambil kesimpulan, Bupati Bangkalan menganut sistem kepemimpinan yang demokratis. Hal ini dapat dilihat dari tata cara pengambilan keputusan, penetapan kegiatan atau tugas, pemberian tugas atau penugasan, pemberian penghargaan dan kritik yang melibatkan masyarakat dan jajaran di bawahnya.

4. Penelitian ini dilakukan oleh Milla Zahidaluthfa “Analisis Pengaruh Variabel Ekonomi dan Politik Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia.”¹⁷

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel ekonomi dan politik terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia dengan periode jangka waktu penelitian yaitu 2011-2016 dan sebanyak 33 provinsi. Variabel yang digunakan

¹⁷ Milla Zahidaluthfa, “Analisis Pengaruh Variabel Ekonomi dan Politik terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia”, (Yogyakarta: Fak. Ekonomi Universitas Islam Indonesia).

dalam penelitian ini adalah Investasi, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), Angka Partisipasi Sekolah (APS), Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah Random Effect Model (FEM). Hasil analisis yang diperoleh menunjukkan bahwa variabel Investasi, APS dan IDI berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia, adapun variabel TPAK tidak signifikan secara statistik dan belum dapat menjelaskan pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

5. Penelitian ini dilakukan oleh Murba “Studi Implementasi Program Pembangunan Infrastruktur di Desa Errecinnong Kecamatan Bontocani Kabupaten Bone.

Hasil penelitian menggambarkan bahwa implementasi pembangunan infrastruktur di Desa Erecinnong masih belum memenuhi harapan masyarakat atau masih mengecewakan (tidak optimal), karena beberapa program pembangunan khususnya pembangunan infrastruktur dalam bidang jalan, listrik dan jaringan yang masih belum terealisasi hingga saat ini bahkan beberapa tahun belakangan ini kurang mendapatkan perhatian dari pemerintah setempat. Selanjutnya mengenai faktor penghambat berjalannya implementasi pembangunan infrastruktur di Desa Erecinnong ada beberapa faktor yaitu:

1. Keterbatasan anggaran

2. Tidak terjalinnya komunikasi yang baik antara pemerintah dan masyarakat.
3. Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur yang disediakan pemerintah sehingga kondisinya cepat rusak.

Beberapa faktor lain seperti ketidak bersatuan masyarakat Desa Erecinnong dan kurangnya partisipasi masyarakat terhadap program pemerintah, dan kurangnya kepedulian masyarakat dalam pembangunan desa serta konstruksi bangunan yang kurang bagus. Implikasi penelitian ini adalah:

1. Perlu adanya tata kelola anggaran dana desa yang transparan dan jeli sehingga anggaran itu sesuai dengan peruntukannya.
2. Pemerintah diharapkan memberikan perhatian penuh terhadap implementasi pembangunan infrastruktur di Desa Erecinnong khususnya dalam bidang jalan yang jauh dari kata baik, listrik dan jaringan yang hingga saat ini belum terealisasi.
3. Pemerintah desa harusnya dalam setiap diadakannya musrembang selalu membahas tentang implementasi pembangunan di Desa Erecinnong sehingga pembangunan mendapat perhatian yang serius dari pemerintah kabupaten.¹⁸

• **Perbedaan penelitian penulis dengan yang diatas**

¹⁸ Murba, “Studi Implementasi Program Pembangunan Infrastruktur di Desa Erecinnong Kecamatan Bonto Cane Kabupaten Bone”, (Makassar: Fak Ushuluddin Filsafat dan Politik Universitas Islam Negeri Makassar 2017)

Adapun perbedaan penelitian penulis dengan beberapa tinjauan pustaka dalam bentuk skripsi, jurnal dan sebagainya yang diatas adalah cara penyajian penulis dalam menyajikan hasil penelitian penulis. Meskipun penulis sadari bahwa setiap penulisan itu pasti mempunyai kesamaan, tetapi tidak semua apa yang telah menjadi hasil penelitian penulis sehingga itulah yang menjadi perbedaan antara apa yang menjadi temuan penulis dengan tinjauan pustaka penulis, Hal ini juga sebagai pelengkap bagi skripsi atau jurnal yang meneliti tentang Politik Pembangunan sebelumnya sehingga mampu menjadi bahan referensi.



BAB II

TINJAUAN TEORITIS

A. Teori Ekonomi Politik

Terdapat empat teori ekonomi politik yang terkait dengan kepemilikan media yang berkembang di dunia saat ini yaitu libertarianisme, kapitalisme, sosialisme dan liberalism modern. Libertarianisme adalah teori ekonomi yang menganggap kebebasan manusia sekaligus peran pemerintah sangat penting keberadaannya. Teori ekonomi politik ini membolehkan kepemilikan media oleh swasta dan pemerintah mengawasi agar persaingan berlangsung sehat. Kapitalisme adalah teori yang mengizinkan individu atau korporasi bisnis memiliki dan mengontrol sumber-sumber kekayaan atau capital Negara industry media dimiliki oleh swasta industry media bebas berkopetensi untuk memperoleh keuntungan sebesar-besarnya. Sosialisme adalah system ekonomi politik yang berpandangan bahwa pemerintah harus memiliki dan mengontrol sumber-sumber kekayaan Negara. Negara menguasai media sehingga tidak ada persaingan ekonomi di bidang industry di media massa. Dan Liberalisme Modern adalah teori ekonomi politik yang memadukan system libertarianisme, kapitalisme dan sosialisme. Liberalisme mengambil hal-hal positif dari ketiga system tersebut.¹⁹

Pendekatan ekonomi politik media menekankan bahwa masyarakat kapitalis terbentuk menurut cara-cara dominan dalam produksi yang menstrukturkan institusi

¹⁹Usman, Televisi, Kekerasan, dan Perempuan. (Jakarta; Kompas, 2009) hal.52

dan praktik sesuai dengan logika homodifikasi dan akumulasi capital. Produksi dan distribusi daya dalam system kapitalis harus berorientasi pada pasar dan profit. Kekuatan produksi seperti teknologi media dan praktik kreatif di bentuk menurut realisasi produksi dominan (seperti profit yang mengesankan), pemeliharaan kontrol hirarkis dan relasi dominasi. karena itu system produksi sangatlah penting dalam menentukan artefak-artefak budaya apa saja yang perlu di produksi dan bagaimana produk-produk itu di konsumsi.²⁰

Dengan pemahaman tersebut, maka orientasi pendekatan ekonomi politik bukanlah semata-mata persoalan ekonomi tetapi juga pada relasi antara dimensi-dimensi ekonomi politik, teknologi dan budaya dari realitas sosial. Dalam kajian ekonomi politik media varian instrumentalisme, sangat terasa sekali pengaruh perspektif tindakan-tindakan sosial yang menekankan pada aspek determinisme individual yang melihat bahwa perilaku manusia ternyata bukan dipengaruhi oleh masyarakat, tetapi masyarakat merupakan produk dari aktivitas manusia melalui tindakan individual dan kelompok. Artinya, individu mempunyai kehendak bebas untuk melakukan tindakan sosial tanpa terpengaruh oleh struktur masyarakatnya.

B. Teori Ekonomi Kelembagaan

Ekonomi kelembagaan Baru menekankan pada bagaimana suatu kelembagaan dibentuk yang berdampak pada perubahan berbagai keinginan individu menjadi

²⁰Sunarto, Televisi Kekerasan dan Perempuan. (Jakarta: Kompas, 2009) hal 12.

keinginan kelompok. Ekonomi kelembagaan Baru menawarkan suatu *framework* yang sesuai dengan kondisi masyarakat.²¹

Ekonomi kelembagaan Baru memberikan dua pandangan. Pertama, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan multidisiplin dalam menganalisis masalah ekonomi. Hal ini lebih mendekati keadaan nyata karena masalah ekonomi merupakan bagian integral dari kehidupan sosial manusia dan tidak mungkin dipelajari secara parsial. Kedua, New Institutional Economics menekankan pada sistem legal dan hukum sebagai determinan utama dari perilaku ekonomi.²²

1. Aliran Kelembagaan Baru Aliran Ekonomi Kelembagaan Baru (New Institutional Economics disingkat NIE), NIE sendiri merupakan upaya perlawanan terhadap dan sekaligus pengembangan ide ekonomi Neoklasik, meskipun tetap saja dapat terpengaruh oleh ideologi dan politik yang pada masing-masing para pemikir.

Ronald Coase yang memperoleh hadiah Nobel Ekonomi pada tahun 1991 dan merupakan salah satu peletak dasar NIE, mengembangkan gagasannya tentang organisasi ekonomi untuk mengimbangi gagasan intelektual kebijakan kompetisi dan regulasi industri Amerika Serikat pada tahun 1960-an, yang menganggap semua itu dapat tercapai oleh kebebasan ekonomi dan kewirausahaan. Meskipun begitu, NIE bisa begitu menarik bagi sebagian pemikir kiri (left-wing think-ers), yaitu mereka yang

²¹Nyoman Utari Vipriyanti, Teori dan Aplikasi Ekonomi dan Kelembagaan Bagi Perencanaan Pembangunan, <http://fp.unmas.ac.id/wp-content/uploads/2018/03/Teori-dan-Aplikasi-Ekonomi-Kelembagaan-Bagi-Perencanaan-Pembangunan.pdf>.

²²Nyoman Utari Vipriyanti, Teori dan Aplikasi Ekonomi dan Kelembagaan Bagi Perencanaan Pembangunan, <http://fp.unmas.ac.id/wp-content/uploads/2018/03/Teori-dan-Aplikasi-Ekonomi-Kelembagaan-Bagi-Perencanaan-Pembangunan.pdf>.

meradsa NIE dapat menyediakan dasar intelektual (teoritis) untuk melunturkan dominasi aliran Neoklasik atau aliran sejenisnya yang bertumpu kepada keberadaan pasar bebas.²³

Aliran ekonomi kelembagaan percaya bahwa kondisi ekonomi akan menentukan bentuk struktur kelembagaan. Keadaan yang terjadi pada ekonomi kelembagaan dengan demikian memetingkan pekerjaan suatu sistem perekonomian, maksudnya transaksi-transaksi ekonomi handa dapat terjadi karna adanya kelembagaan dalam artian tanpa kelembagaan mustahil akan timbul transaksi ekonomi.²⁴

C. Kebijakan Publik

Kebijakan public menurut Thomas R Dey, adalah apapun pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan (*public Policy is Whatever government choose to do or not to do*).²⁵Sedangkan menurut Charles O.Jones, istilah kebijakan (*policy term*) digunakan dalam praktek sehari-hari namun digunakan untuk menggantikan kegiatan atau keputusan yang sangat berbeda. Pemahaman yang diperjelas oleh Richard Rose yakni bahwa kebijakan hendaknya dipahami sebagai “serangkaian kegiatan yang sedikit banyak berhubungan serta konsekuensinya-

²³Purbayu budi Santoso, Relevansi dan Aplikasi Aliran Ekonomi Kelembagaan, Jurnal Ekonomi Pembangunan Vol.9, No.1, Juni 2008, hal 54.

²⁴ Purbayu Budi Santoso, Kegagalan Aliran Ekonomi Neo Klasik dan Relevansi Aliran Ekonomi Kelembagaan dalam Ranah Kajian Ilmu Ekonomi, (Semarang:Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2010). Hal. 33.

²⁵AG. Subarsono, Analisi Kebijakan Publik “ Konsep, Teori, dan Aplikasi,5 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), h. 2

konsekuensinya bagi mereka yang bersangkutan daripada sebagai suatu keputusan tersendiri.²⁶

Sebagai Rentetan kebijakan public sangatlah banyak, maka dapat di kelompokkan secara sederhana menjadi 3 yaitu:

Analisi Kebijakan adalah aktivitas menciptakan pemahaman pengetahuan tentang dan dalam proses pembuatan kebijakan. Dalam menciptakan pengetahuan tentang proses pembuatan kebijakan analisis kebijakan meneliti sebab, akibat, dan kinerja kebijakan dan program publik. Pengetahuan tersebut betapa pun tetap tidak lengkap kecuali jika hal tersebut disediakan kepada pengambil kebijakan dan public terhadap siapa para analis berkewajiban melayani. Jika hanya tentang kebijakan dikaitkan dengan pengetahuan dalam proses kebijakan, anggota-anggota badan eksekutif, legislative dan yudikatif bersama dengan warga Negara yang memiliki peranan dalam keputusan keputusan public, dapat menggunakan hasil-hasil analisis kebijakan untuk memperbaiki proses pembuatan kebijakan dan kinerjanya. Karena efektivitas pembuatan kebijakan tergantung pada akses terhadap stok pengetahuan yang tersedia, komunikasi dan penggunaan analisis kebijakan menjadi penting sekali dalam praktik dan teori pembuatan kebijakan public.²⁷

Analisis kebijakan bersifat deskriptif, diambil dari disiplin-disiplin tradisional (misalnya ilmu politik) yang mencari pengetahuan tentang sebbab dan akibat dari

²⁶ Budi Winarno, Kebijakan Publik: Teori dan Proses, (Yogyakarta: Media Pressindo, 2007), h. 16-17

²⁷ William N. Dunn, Pengantar Analisis Kebijakan Publik “Edisi Kedua”, (Yogyakarta, Gadjah Mada University Press, 2003) Hal. 1-2.

kebijakan-kebijakan public. Namun analisis kebijakan bersifat normatif, tujuan lainnya adalah menciptakan dan melakukan kritik terhadap klaim pengetahuan tentang nilai kebijakan public untuk generasi masa lalu, masa kini dan masa mendatang. Aspek normative, atau kritik nilai, dari analisis kebijakan ini terlihat ketika kita menyadari bahwa pengetahuan yang relevan dengan kebijakan mencakup dinamika antara variabel tergantung (tujuan) dan variabel bebas (cara) bersifat valuatif.²⁸

Kebijakan public atau public policy kita ketahui merupakan aturan-aturan yang sudah ditetapkan dan harus ditaati. Bagi siapa yang melanggar akan mendapatkan sesuai dengan bobot pelanggaran yang dilakukan dan sanksi yang dijatuhkan di depan masyarakat oleh lembaga yang mempunyai tugas menjatuhkan sanksi tersebut. Jadi, kebijakan public ini bisa kita ibaratkan suatu hukum. Bukan hanya sekedar hukum namun kita harus memahaminya secara benar. Ketika suatu isu yang menyangkut kepentingan bersama dipandang perlu untuk diatur maka formulasi isu tersebut menjadi kebijakan public yang harus dilakukan dan disusun serta disepakati oleh para pejabat yang berwenang.²⁹

Hal ini dilakukan untuk menciptakan atau menilai dan mengkomunikasikan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan yang ada dalam satu atau lebih tahap proses pembuatan kebijakan. Tahap-tahap tersebut menjelaskan aktivitas yang terus berlangsung yang terjadi dalam masyarakat.

²⁸ William N. Dunn, Pengantar Analisis Kebijakan Publik “Edisi Kedua”, (Yogyakarta, Gadjah Mada University Press, 2003) Hal. 3.

²⁹ DR. Andriansyah, M.Si, *Kebijakan Publik*, Jurnal, 2016.

1) Penyusunan Agenda (*agenda setting*)

Proses kebijakan publik diawali dengan penyusunan agenda (*agenda setting*) yaitu sebuah fase dan proses yang sangat strategis dalam realitas kebijakan publik. Dalam proses ini memiliki ruang untuk memaknai suatu masalah publik dan prioritas dalam agenda publik dipertarungkan. Isu kebijakan (*policy issues*) sering disebut juga sebagai masalah kebijakan (*policy problem*). Isu kebijakan lazimnya muncul karena telah atau akan ditempuh, atau pertentangan pandangan mengenai karakter permasalahan itu sendiri.

2) Formulasi Kebijakan (*policy formulation*)

Langkah kedua dalam proses kebijakan setelah agenda setting adalah formulasi kebijakan. Masalah yang sudah masuk dalam agenda kebijakan kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan. Masalah masalah yang masuk diidentifikasi untuk kemudian dicari pemecahan yang terbaik. Formulasi kebijakan memiliki aktivitas yang sangat penting dalam kerangka peramala. Formulasi kebijakan akan memberi gambaran mengenai konsekuensi di masa mendatang dan di terapkannya kebijakan tersebut.

3) Implementasi Kebijakan (*policy implementation*)

Berhasil tidaknya suatu kebijakan pada akhirnya ditentukan pada tataran implementasinya. Sering dijumpai bahwa proses perencanaan kebijakan yang baik sekalipun tidak dapat menjamin keberhasilan dalam implementasinya. Implementasi pada hakikatnya juga upaya pemahaman apa yang seharusnya terjadi setelah sebuah program dilaksanakan. Implementasi kebijakan tidak hanya melibatkan instansi yang

bertanggung jawab untuk pelaksanaan kebijakan tersebut, namun juga menyangkut jaringan kekuatan politik, ekonomi, dan sosial. Tahap paling akhir dalam kebijakan adalah penilaian kebijakan. Secara umum evaluasi kebijakan dapat dikatakan sebagai kegiatan yang menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan yang mencakup substansi implementasi dan dampak.

D. Teori Pembangunan

Sejak keluarnya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN 2004), kedudukan perencanaan pembangunan daerah di Indonesia menjadi semakin kuat. Argumentasi yang semula berkembang tentang tidak perlunya pembangunan diatur melalui sistem perencanaan dalam era otonomi daerah, otomatis sudah tidak perlu diperdebatkan lagi. Dengan adanya undang-undang tersebut, maka penyusunan perencanaan menjadi suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh penyusunan perencanaan menjadi suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh setiap aparat pemerintah dalam melaksanakan kegiatannya sehari-hari dan bila hal ini tidak dilakukan akan menimbulkan implikasi hukum tertentu.³⁰

Istilah ‘pembangunan’ dapat didefinisikan mengandung pengertian adanya suatu situasi yang berkembang, atau suatu perkembangan kepribadian seseorang untuk memperlihatkan sedikit lebih banyak daripada sekedar proses yang berlangsung,

³⁰ Sjafrizal, *Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Era Otonomi*, Cet 3 (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2016) Hal.1

meski sulit untuk membayangkan pola umum yang menjelaskan setiap proses perkembangan. pembangunan politik yang dipandang sebagai usaha pencarian kemampuan umum belajar, dan memperbaiki tingkah laku melalui proses ini. Lebih lanjut Dadd mengatakan 'pembangunan di lain pihak dapat diartikan sebagai kemajuan kearah tujuan yang lebih luas, atau kemajuan ke arah yang ditentukan oleh agen, atau oleh diri sendiri'³¹. Lebih daripada itu bahwa pembangunan politik terkait juga dengan masalah partisipasi massa dan kerlibatan rakyat dalam kegiatan-kegiatan politik. Partisipasi ini, bisa bercorak demokratis atau totaliter. Namun, yang terpenting adalah semua orang yang menjadi warga Negara ikut aktif dalam proses politik³²

Politik pembangunan sebagai suatu konsep diperlukan untuk menjelaskan bagaimana cara-cara politik atau strategi-strategi/aliran tertentu yang digunakan dalam konteks pembangunan mencapai sasarannya, cara atau strategi tertentu ini dapat dilakukan oleh negara, institusi/organisasi ataupun partai politik dan juga oleh individu ataupun kelompok masyarakat sipil. Oleh yang demikian, sesungguhnya pembangunan pada dasarnya hasil dari proses politik yang dilakukan aktor-aktor didalamnya; oleh pemerintah dengan perangkat-perangkat lain seperti lembaga, partai politik, atau bahkan kelompok masyarakat. Aktor-aktor dalam politik pembangunan bukan saja berasal dari dalam negeri tapi juga berasal dari luar negeri. Artinya, kepentingan internasional juga memainkan peranan penting dalam politik

³¹Desi, "*pembangunan*", (Yogyakarta : Lambung Pustaka UNY, 2013). hal 16.

³²Desi, "*pembangunan*", (Yogyakarta : Lambung Pustaka UNY, 2013). hal 17.

pembangunan. Karena aktor-aktor ini memiliki kepentingan dan perspektif dalam pembangunan dan bagaimana cara mencapai tujuan dari pembangunan, maka didalam politik pembangun terkandung ideologi politik pembangunan. Keberadaan variabel politik pembangunan politik ini saling memengaruhi. Artinya, pemahaman seperti itu, saya menyimpulkan bahwa variabel-variabel penting dalam politik pembangunan, sebagai berikut :

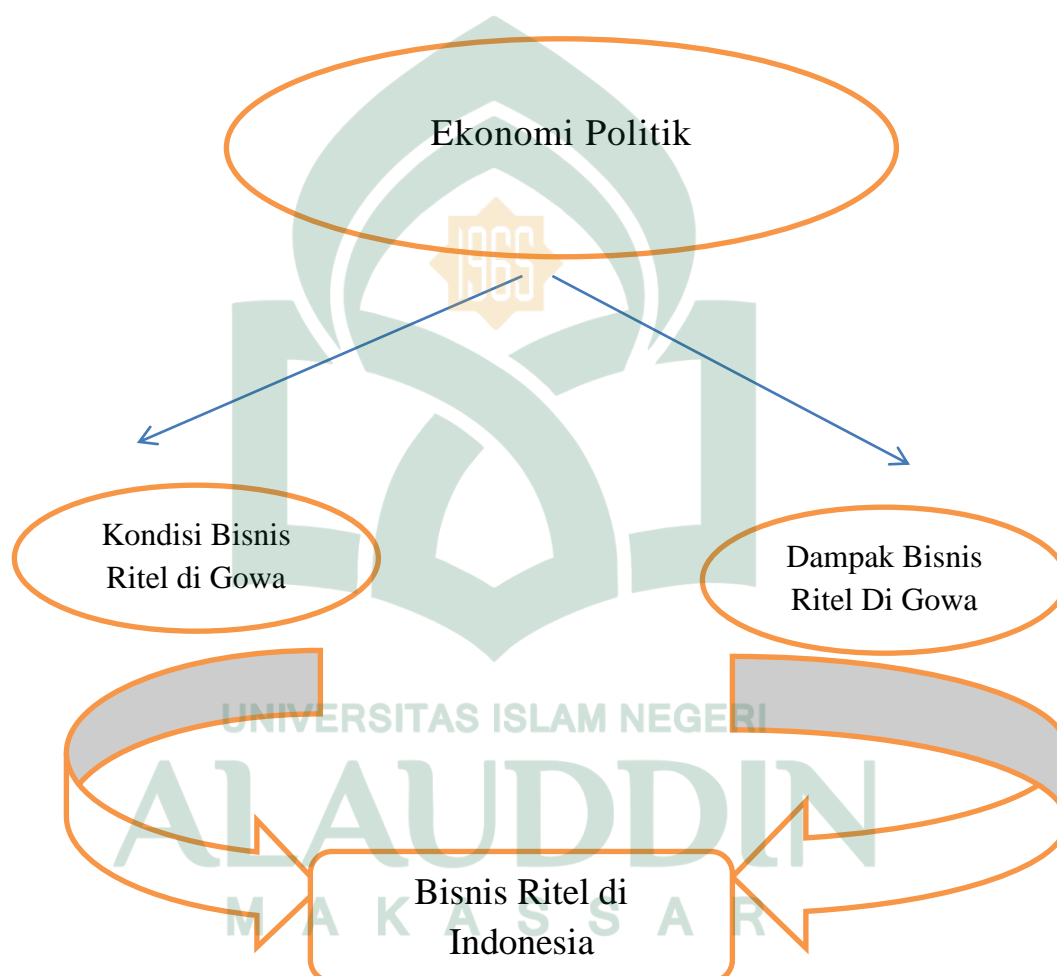
1. Adanya aktor-aktor pembangunan
2. Adanya kekuasaan
3. Adanya sistem ideologi,dan
4. Intervensi asing³³

Kebijakan Pemerintah sebagai salah satu fokus kajian dari perilaku politik telah banyak mendapat perhatian dari para ahli, namun tetap saja menarik untuk dibahas. Hal ini disebabkan kerana masalah Program Kerja politik merupakan hal yang terpenting bagi suatu Kelembagaan Baik itu Lembaga fomal maupun Lembaga Non formal serta pemimpin merupakan paling banyak diperbincangkan karena berkaitan dengan kebijakan-kebijakan mereka kedepannya. Menurut William H.Newman kepemimpinan adalah “kegiatan untuk mempengaruhi perilaku orang lain atau seni mempengaruhi perilaku manusia baik perorangan maupun kelompok. Dan satu hal yang perlu diingat bahwa kepemimpinan tidak harus dibatasi oleh aturan-aturan atau tata karama birokrasi”³⁴

³³Warjio,Ph.D.,”*Politik Pembangunan*”,(Jakarta:Kencana Prenadamedia Group, 2016),h141

³⁴ Miftah Thoha, ”*Kepemimpinan Dalam Manajemen*”,(Jakarta,:Rajawali Pers,2009),h.54.

Skema Kerangka Pemikiran



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Lokasi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Penelitian kualitatif yaitu meneliti informan sebagai subjek penelitian dalam lingkungan hidup keseharian. Untuk itu, peneliti sebisa mungkin berinteraksi secara dekat dengan informan. Penelitian kualitatif bersifat deskriptif yaitu berupa narasi cerita, penuturan informan, dokumen-dokumen pribadi seperti foto, catatan pribadi, perilaku gerak tubuh, mimic, dan banyak hal lain yang tidak didominasi oleh angka-angka sebagaimana penelitian kuantitatif.³⁵

B. Lokasi Penelitian

Adapun Lokasi Penelitian ini adalah Alfamart di jalan Masjid Raya, Sungguminasa Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa Sulawesi Selatan. Karena peneliti bisa mendapatkan informan dan data lebih mudah.

³⁵Muhammad Idrus, *Metode Penelitian Ilmu Sosial: Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif* (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2009), h. 23-25

C. Sumber Data

1. Data Primer

Data primer adalah suatu objek atau dokumen original material mentah dari perilaku yang disebut fist hand information. Individu kelompok focus dan satu kelompok responden secara khusus sering dijadikan peneliti sebagai sumber data primer. Sumber data primer ini terdiri dari opini objek subjek secara individual atau kelompok, hasil observasi terhadap sesuatu dan lain-lainnya.³⁶

Data primer diperoleh secara langsung dari sumber aslinya berupa wawancara maupun hasil observasi yang kebenarannya berdasarkan sesuai dengan fakta yang terjadi dilapangan dan melibatkan actor politik seperti warga masyarakat di Kabupaten Gowa.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat dokumen.³⁷ Dalam penelitian ini, data sekunder adalah data yang diperoleh dari berbagai sumber yang berhubungan dengan hal-hal yang diteliti berupa: dokumentasi, buku, majalah, surat kabar, serta literatur-literatur yang berkaitan dengan masalah penelitian.

³⁶ Ulber Silalahi, metode Penelitian Sosial (Bandung: Reflika Asitama, 2010), h. 289

³⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2016) h. 137.

D. Metode Pengumpulan Data

1. Observasi

Observasi atau pengamatan berarti setiap kegiatan untuk melakukan pengukuran. Data yang diperoleh dari subjek pada saat terjadinya tingkah laku. Tingkah laku yang diharapkan mungkin akan muncul atau mungkin tidak akan muncul. Karena tingkah laku dapat dilihat, maka dapat dikatakan bahwa yang diukur memang suatu yang dimaksudkan untuk diukur.³⁸ Penelitian yang dilakukan yaitu dengan melakukan pengamatan secara langsung pada Dominasi Pasar Bisnis Ritel Alfamart di Gowa, Sulawesi Selatan.

2. Wawancara

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan masalah yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal yang lebih mendalam dan dalam jumlah informan yang sedikit/kecil. Wawancara dapat dilakukan secara terstruktur maupun tidak terstruktur, dan dapat dilakukan melalui tatap muka maupun dengan menggunakan telepon.³⁹ Wawancara langsung dilakukan dengan pemerintah daerah gowa sedangkan wawancara tidak langsung dilakukan peneliti melalui telepon, e-mail, dan sosial media.

³⁸ Irawan Soehartono, *Metode Penelitian Sosial: Salah Satu Teknik Penelitian Bidang Kesejahteraan Sosial dan Ilmu Sosial Lainnya* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2011), h. 69.

³⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*, h. 137-138.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan kepada subjek penelitian. Dokumen dapat berupa buku harian, surat pribadi, laporan, notulen rapat, dan lainnya.⁴⁰

E. Instrumen Penelitian

Instrumen dalam penelitian ini adalah dengan hasil pengumpulan data peneliti. Adapun instrumen pengumpulan data yaitu;

1. Pedoman observasi, merupakan penelitian dengan cara mengamati objek yang akan diteliti sesuai dengan kenyataan dan fakta yang ada di lapangan.
2. Pedoman wawancara, merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan cara langsung bertanya ke responden yang mengacu pada pedoman wawancara yang telah di persiapkan.
3. Format catatan dokumentasi, adalah format pengumpulan data dengan cara mengumpulkan dokumen untuk keabsahan data.

F. Informan

Orang yang betul-betul dianggap memahami permasalahan yang ingin diteliti di lapangan. Peraturan daerah kabupaten gowa mengenai pembangunan Alfamart :

1. Dinas Perdagangan dan Perindustrian

2. Kepala Toko Alfamart

⁴⁰ Irawan Soehartono, *Metode Penelitian Sosoal: Salah Satu Teknik Penelitian Bidang Kesejahteraan Sosial dan Ilmu Sosial Lainnya*, h. 70-71.

3. Sekretaris Alfamart

4. Masyarakat

G. Analisis Data

1. Reduksi Data

Reduksi adalah memilih, memfokuskan, menterjemahkan dengan membuat catatan dengan mengubah data yang mentah yang dikumpulkan dalam penelitian kedalam yang disortir atau diperiksa. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasi data dengan cara yang sedemikian rupa sehingga kumpulan-kumpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi.⁴¹ Dengan kata lain, Reduksi data merupakan bentuk analisis yang mempertegas, memperpendek, membuat fokus, membuang hal yang tidak penting dan mengatur sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhir dapat dilakukan.⁴² Pada tahap ini, setelah mendapatkan data dari hasil wawancara yang berupa rekaman MP3, field note, dan pengamatan lainnya, penulis langsung melakukan transfer data kedalam sebuah tulisan yang lebih teratur dan sistematis. Sebagai upaya meminimalisasi reduksi data karena keterbatasan ingatan. Tahap ini merupakan tahap analisis data yang mempelajari atau memutuskan, membuat dan sekaligus dapat dibuktikan.

⁴¹Sugiyono. *Metode penelitian kuantitatif Kualitatif dan R&D*, h. 338.

⁴²Sugiyono. *Metode penelitian kuantitatif Kualitatif dan R&D*, h. 339.

2. Penyajian Data

Penyajian data adalah menyusun informasi dengan cara tertentu sehingga memungkinkan dilakukan penarikan kesimpulan atau pengambilan tindakan. Pengambilan data ini membantu untuk memahami peristiwa yang terjadi dan mengarah pada analisis atau tindakan lebih lanjut berdasarkan pemahaman. Adapun bentuk penyajiannya adalah dalam bentuk naratif (pengungkapan secara tertulis).⁴³ Penyajian data dilakukan dengan cara mendeskripsikan data yang ada secara sederhana, rinci, dan utuh yang digunakan sebagai dasar untuk menentukan langkah selanjutnya yaitu penarikan kesimpulan/verifikasi.

3. Penyimpulan Data

Penarikan kesimpulan dapat saja berlangsung saat proses pengumpulan data berlangsung, baru kemudian dilakukan reduksi dan penyajian data. Hanya saja yang perlu disadari bahwa kesimpulan yang dibuat itu bukan sebuah kesimpulan final. Hal ini karena setelah proses penyimpulan tersebut, peneliti dapat melakukan verifikasi hasil temuannya kembali di lapangan. Dengan begitu, kesimpulan yang diambil dapat sebagai pemicu peneliti untuk lebih memperdalam lagi proses observasi dan wawancaranya. Dengan demikian verifikasi, peneliti dapat mempertahankan dan menjamin validitas dan reliabilitas temuannya.

⁴³Sugiyono. *Metode penelitian kuantitatif Kualitatif dan R&D*, h. 249.

H. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah mekanisme yang harus dilakukan oleh peneliti dalam mengumpulkan data, yang merupakan langkah paling strategis dalam penelitian, karena tujuan penelitian adalah mendapatkan data.⁴⁴ Dari data yang dikumpulkan mulai hasil observasi atau informasi dari masyarakat, dan wawancara. setelah semua data terkumpul kemudian di hubungkan dengan masalah penelitian.

I. Pengujian Keabsahan Data

Penelitian ini merupakan data sesuai dengan fakta-fakta yang terjadi dilapangan, penelitian ini bukan dari hasil manipulasi data. Bahkan terdapat beberapa metode dalam melakukan penelitian seperti metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Kerja kualitatif bergantung pada pengamatan dan pengukuran kejadian fenomena politik yang berulang seperti pemungutan suara bagi sebuah partai politik, dengan mengamati Variabel dalam banyak kasus, dimungkinkan membuat kesimpulan tentang suatu jenis perilaku politik.⁴⁵ Dan pengecekan atau pemerisaan yang dilakukan oleh peneliti antara lain yaitu;

1. Triangulasi metode, yaitu dengan cara mencari beberapa data-data mulai dari metode observasi, metode wawancara, dan metode dokumentasi. Dan

⁴⁴Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani, *Metodologi Penelitian.*, h 203

⁴⁵Marsh David dan Stoker Gerry, *Teori dan Metode dalam Ilmu Politik* (Bandung: Nusa Media, 2010),, h. 265.

fenomena tersebut dapat dibandingkan sehingga memperoleh data yang dapat di percaya.

2. Triangulasi sumber, yaitu dengan cara membandingkan kebenaran suatu fenomena berdasarkan hasil peneliti yang dapat dilihat dari dimensi waktu dan sumbernya.



BAB IV

Gambaran Umum Dan Hasil Penelitian

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Kabupaten Gowa

Kesultanan Gowa atau kadang ditulis “Goa”, adalah salah satu kerajaan besar dan paling sukses, bahkan pernah menjadi penguasa tertinggi atas kerajaan-kerajaan lain di daerah Sulawesi Selatan dan merupakan pintu gerbang kawasan timur nusantara yang kaya akan hasil alam terutama rempah-rempah. Rakyat dari kerajaan ini berasal dari Suku Makassar yang terdiam di ujung selatan dan pesisir barat Sulawesi bagian selatan wilayah kerajaan ini sekarang berada di bawah kabupaten Gowa dan beberapa bagian daerah sekitarnya. Kerajaan ini memiliki raja yang paling terkenal bergelar Sultan Hasanuddin, yang saat ini melakukan peperangan yang dikenal dengan Perang Makassar (1666-1669) terhadap VOC yang dibantu oleh Kesultanan Bone yang dikuasai oleh satu wangsa (Dinasti) Suku Bugis dengan rajanya, Arung Palakka. Sejatinnya perang Makassar bukanlah perang anatarsuku melainkan perang antara dua persekutuan, karena pihak Gowa memiliki sekutu dari kalangan Bugis yaitu, Wajo, Lueu, Bulu-bulu, Lamatti dan raja, demikian pula pihak Belanda-Bone memiliki sekutu orang Makassar yaitu wilayah Turatea. Perang Makassar adalah perang terbesar VOC yang pernah dilakukannya pada abad-17.⁴⁶

⁴⁶ Leonard Y. Andaya, *Warisan Arung Palakka*, (Makassar: Ininawa, 2004), h.14.

- **Sejarah Singkat Gowa**

Sebelum Kerajaan Gowa terbentuk, terdapat 9 (Sembilan) Negeri atau Daerah yang masing-masing dikepalai oleh seorang penguasa yang merupakan Raja Kecil. Negeri ini ialah Tombolo, Lakiung, Samata, Parang-parang, Data, Agang je'ne, Bisei, Kalling dan Sero. Pada suatu waktu Paccalayya bersama Raja-Raja Kecil itu masygul karena tidak mempunyai raja, sehingga mereka mengadakan perundingan dan sepakat memohon kepada Dewata agar menurunkan seorang wakilnya untuk memerintah Gowa.

Peristiwa ini terjadi pada tahun 1320 (Hasil Seminar Mencari Hasil Jadi Gowa) dengan diangkatnya Tumanurung menjadi Raja Gowa maka kedudukan Sembilan raja kecil itu mengalami perubahan, kedaulatan mereka dalam daerahnya masing-masing dan berada di bawah pemerintahan Tumanurung Baenia selaku Raja Gowa Pertama yang bergelar Karaeng Sombaya Ri Gowa.

Raja Kecil hanya merupakan Kasuwiyang Salapanga (Sembilan Pengabdian) kemudian lembaga ini berubah menjadi Bate Salapang (Sembilan Pemang Benda).⁴⁷

- **Bupati Gowa dari 1957 sampai sekarang**

NO	Nama Bupati	Periode
1	Andi Ijo Karaeng Lalolang	1957-1960
2	Andi Tau	1960-1967
	H.M. Yasin Limpo	Karetaker

⁴⁷Zainuddin Tika, Profil Sejarah Budaya dan Pariwisata Kabupaten Gowa, (Makassar: Pustaka Refleksi, 2000), h. 38-39

4	Andi Bachtiar	Karetaker
5	K.S. Mas'ud	1967-1976
6	H. Muhammad Arif Sirajuddin	1976-1984
7	H.A. Kadir Dalle	1984-1989
8	H.A. Aziz Umar	1989-1994
9	H. Syahrul Yasin Limpo, SH, Msi	1994-2002
10	H. Andi Baso Machmud	Karetaker
11	H.Ichsan Yasin Limpo, SH	2005-2015
12	Adnan Purichta Ichsan, SH, MH	2015-Sekarang

*Sumber: Kantor Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten
Gowa*

2. Kependudukan

Kecamatan	Jumlah Penduduk Jiwa							
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Bontonompo	39 690	40 349	41 604	41 138	41 502	41 818	42 110	42 337
Bontonompo Selatan	28 758	29 235	30 145	29 453	29 626	29 763	29 882	29 958
Bajeng	62 961	64 007	65 997	66 875	67 883	68 820	69 727	69 973
Bajeng Barat	23 149	23 533	24 265	24 296	24 588	24 852	25 106	25 388
Palangga	99 715	101 371	104 523	113 417	117 115	120 780	124 049	124 542
Barombong	34 874	35 453	36 555	37 933	38 734	39 503	40 262	40 630
Somba Opu	131 598	133 784	137 942	151 916	157 448	162 979	168 021	169 118
Bontomarannu	31 565	32 089	33 086	33 858	34 453	35 014	35 563	35 831
Patallassang	22 101	22 468	23 166	23 414	23 752	24 064	24 366	24 490
Parangloe	16 731	17 009	17 538	17 834	18 118	18 384	18 643	18 787
Manuju	14 235	14 471	14 921	14 728	14 852	14 959	15 057	15 145

Tinggimoncong	22 361	22 732	23 438	23 366	23 621	23 850	24 065	24 203
Tombolo Pao	27 146	27 597	28 454	28 504	28 850	29 164	29 463	29 609
Parigi	13 221	13 441	13 859	12 882	12 797	12 697	12 708	12 743
Bungaya	16 006	16 272	16 778	16 218	16 269	16 300	16 468	16 477
Bontolempangan	13 466	13 690	14 116	12 698	12 512	12 313	12 326	12 335
Tompobulu	29 263	29 749	30 674	28 853	28 784	28 608	28 704	28 720
Biringbulu	32 673	33 215	34 248	32 003	31 834	31 625	31 680	31 695
Kabupaten Gowa	659 513	670 465	691 309	709 386	722 702	735 493	748 200	751 981

Sumber : BPS Kabupaten Gowa

Dengan jumlah penduduk yang menembus angka lebih dari tujuh ratus lima puluh satu jiwa, di satu sisi adalah potensi yang cukup memandai untuk melaksanakan program pembangunan di berbagai aspek kehidupan akan tetapi disisi lain dengan tingkat pertumbuhan penduduk yang relatif rendah juga sekaligus merupakan sebuah persoalan dalam upaya mengembangkan potensi sumber daya di miliki.

Jumlah penduduk Kabupaten Gowa pada tahun 2019 sebanyak 751.981 orang.⁴⁸

3. Arti Lambang Kabupaten Gowa

- Dasar lambing warna putih melambangkan tanda suci dengan itikad yang luhur untuk mencapai cita-cita bangsa yaitu masyarakat adil dan makmur yang diroddhoi oleh Tuhan Yang Maha Esa.
- Bentuk Bingkai Persegi Lima warna hitam adalah melambangkan Pancasila Dasar dan Falsafah Negara Republik Indonesia.
- Buah Padi berwarna Kuning Emas dan Buah Kapas berwarna Putih melingkari bingkai persegi lima perlambang kemakmuran.

⁴⁸BPS (Badan Pusat Statistik) Kabupaten Gowa Tahun 2019

- d. Bagian depan terdapat tangga berwarna hitam bertuliskan Gowa dengan huruf latin warna putih menghubungkan buah padi dan kapas perlambang Gowa siap melaksanakan pembangunan yang bertahap.
- f. Depan benteng Nampak terpancang duah buah meriam warna merah, dimukanya bertengger seekor ayam jantan berwarna putih berjengger merah sedang berkokok perlambang Kepahlawanan Nasional Sultan Hasanuddin yang berasal dari Gowa.
- g. Ditengah-tengah berdiri sebatang pohon lontara berwarna hitam, buah Sembilan biji berwarna merah, perlambang kebudayaan Gowa sebagai bagian dari Kebudayaan Nasional.
- h. Latar belakang lambing Nampak sinar warna kuning emas dengan pancaran tujuh belas, perlambang 17 Agustus dan daun nyiur yang melambai, perlambang Tanah Airku Indonesia.⁴⁹

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
 MAKASSAR

⁴⁹<http://humas.gowakab.go.id/gowata/lambang>. Diakses Pada Tanggal 16 Januari 2020, pukul 21.25 Wita.

b. Letak dan kondisi geografis



Kabupaten Gowa berada pada 119.3773° bujur derajat dan 120.0317° Bujur Timur, 5.0829342862° Lintang Utara dan 5.577305437° Lintang Selatan. Kabupaten yang berada di daerah selatan dari Sulawesi Selatan merupakan daerah otonom ini, disebelah Utara berbatasan dengan kota Makassar dan Kabupaten Maros. Di sebelah Timur berbatasan kabupaten Sinjai, Bulukumba dan Bantaeng. Di sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Takalar dan Jeneponto sedangkan di bagian Baratnya dengan kota Makassar dan Takalar.⁵⁰

Wilayah kabupaten Gowa terdiri dari 18 kecamatan dan 116 kelurahan dengan luas sekitar 1.883.33 kilo meter persegi atau sama dengan 3.01 persen dari luas wilayah provinsi Sulawesi selatan. Wilayah kabupaten Gowa sebagian besar merupakan daratan tinggi yaitu sekitar 72,26 persen. Ada 9 wilayah ke daratan

⁵⁰ BPS (Badan Pusat Statistik) Kabupaten Gowa Tahun 2019

tinggi yaitu sekitar 72,26 persen. Ada 9 wilayah ke daratan tinggi yaitu sekitar 72,26 persen. Dan total luas Kabupaten Gowa 35,30 persen mempunyai kemiringan tanah di atas 40 derajat.⁵¹kecamatan yang berada dalam wilayah Kabupaten Gowa yaitu:

1. Bontonompo
2. Bontonompo Selatan
3. Bajeng
4. Bajeng Barat
5. Palangga
6. Barombong
7. Somba Opu
8. Bontomarannu
9. Patallassang
10. Parangloe
11. Manuju
12. Tinggimoncong
13. Tombolo Pao
14. Parigi
15. Bungaya
16. Bontolempangan
17. Tompobulu
18. Biringbulu

⁵¹ BPS (Badan Pusat Statistik) Kabupaten Gowa Tahun 2019

B. Profil Alfamart

1. Sejarah Berdirinya Alfamart Sejak 1989

Alfamart adalah sebuah brand minimarket penyedia kebutuhan hidup sehari-hari yang dimiliki oleh PT. Sumber Alfaria Trijaya Tbk. Pada tahun 1989 merupakan awal berdirinya Alfamart, dengan dimulainya usaha dagang rokok dan barang-barang konsumsi oleh Djoko Susanto dan keluarga yang kemudian mayoritas kepemilikannya dijual kepada PT. HM Sampoerna pada Desember 1989. Pada tahun 1994 Struktur kepemilikan berubah menjadi 70% dimiliki oleh PT. HM Sampoerna Tbk dan 30% dimiliki oleh PT. Sigmantara Alfindo (keluarga Djoko Susanto).

PT. Alfa Minimart Utama (AMU) didirikan pada tanggal 27 juli 1999, dengan pemegang saham PT. Alfa Retailindo Tbk sebesar 51% dan PT. Lancar Distrindo sebesar 49%. PT. alfa Minmart Utama (AMU) ini kemudian membuka Alfa Minimart pada tanggal 18 Oktober 1999 berlokasi di jalan Beringin Raya, Karawaci Tangerang.

Pada tanggal 27 Juni 2002, PT. HM Sampoerna Tbk secara resmi merestrukturisasi kepemilikan sahamnya di PT. Alfa Retailindo Tbk. Saham HM Sampoerna di Alfa Retailindo yang semula 54,4% dikurangi menjadi 23,4%. Disisi lain perusahaan rokok terbesar kedua di Indonesia akan mulai menggarap serius pasar minimarket yang selama ini belum tergarap melalui Alfamart.

Pada tanggal 1 Aguatus 2002, kepemilikan beralih ke PT. Sumber Alfaria Trijaya dengan pemegang saham PT. HM Sampoerna Tbk sebesar 70% dan PT.

Sigmantara Alfalindo sebesar 30%. Kemudian nama Alfa Minimarket diganti menjadi Alfamart pada tanggal 1 Januari 2003.

Awal tahun 2006 PT. HM Sampoerna Tbk menjual sahamnya, sehingga struktur kepemilikan menjadi PT. Sigmantara Alfindo (60%) dan PT. Cakrawala Mulia Prima (40%). Mendapat sertifikat ISO 9001:2000 untuk Sistem Manajemen Mutu.

Awal 2009 menjadi Perusahaan Publik pada tanggal 15 Januari 2009 di Bursa Efek Indonesia disertai dengan penambahan jumlah gerai menjapai 3000 toko.⁵²

2. Beroperasi Pertama kali di Banten

Gerai Alfa Minimarket secara perdana dibuka di JL. Beringin Jaya, Karawaci, Tangerang, Banten. Setelah 4 tahun beroperasi, barulah Alfa Minimarket secara resmi berganti nama Alfamart.

3. Puluhan Ribu Gerai

Alfamart memiliki 10.666 jaringan minimarket yang terdiri dari minimarket milik sendiri sebanyak 7.596 unit dan minimarket bentuk kerjasama waralaba sebanyak 3.070. semua gerai tersebut tersebar beberapa tempat.

Alfamart adalah gerai komunitas, karenanya kami selalu berpartisipasi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) yang terbagi menjadi Alfamart Care yang membantu masyarakat melalui kegiatan-kegiatan sosial. Alfamart Smart mendukung bidang

⁵² Rayhan Mahera, Pengaruh Keberadaan Minimarket Alfamart Terhadap Omset Penjualan Usaha Retail ditinjau Menurut Ekonomi Islam (Studi Kasus: Alfamart Jalan Delima, Kecamatan Tampan, Pekanbaru), Skripsi, (Riau: Fak.Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, 2014).

pendidikan, Alfamart Sport mensponsori kegiatan olahraga, Alfamart Clean dan Green mewujudkan lingkungan yang sehat, Alfamart SMEs membantu pengusaha kecil dan menengah yang ada di sekitar gerai-gerai Alfamart serta Alfamart Vaganza yang secara aktif ikut terlibat dalam pengembangan seni dan budaya. Atas segala prestasi dan perannya dalam masyarakat, Alfamart menerima berbagai penghargaan dari institusi dengan reputasi terpercaya, di antaranya adalah Top Brand Award Superbrands Indonesia Awards, Indonesia's, Service Quality Award, Indonesia's Most Admire Company, dan CSR Award Alfamart juga berhasil mencapai store Equity Index tertinggi berdasarkan Nielsen Research selama 5 tahun berturut-turut.⁵³

Alfamart juga merupakan minimarket yang menerapkan sistem waralaba, dimana usaha minimarket itu salah satu jenis usaha cukup rumit karena ada cukup banyak elemen yang harus diatur dengan matang dan diperlukan keterampilan yang memadai dalam menjalankannya.

3. Visi dan Misi

Visi:

“Menjadi jaringan distribusi ritel termuka yang dimiliki oleh masyarakat luas, berorientasi kepada pemberdayaan pengusaha kecil, pemenuhan kebutuhan dan harapan konsumen, serta mampu bersaing secara global”

⁵³<https://blog.alfamartku.com/2016/10/13/sejarah-singkat-dan-alamat-alfamart-di-seluruh-indonesia/>. Diakses pada tanggal 21 Januari 2020.02 wita.

Misi :

1. Memberikan kepuasan kepada pelanggan/konsumen dengan berfokus pada produk dan pelayanan yang berkualitas unggul.
2. Selalu menjadi yang terbaik dalam segala hal yang dilakukan dan selalu menengakkan tingkah laku/ etika bisnis yang tertinggi
3. Ikut berpartisipasi dalam membangun Negara yang menumbuhkembangkan jiwa wiraswasta dan kemitraan usaha.
4. Membangun organisasi global yang terpercaya, tersebut dan terus bertumbuh dan bermanfaat bagi pelanggan, pemasok, karyawan, pemegang saham dan masyarakat pada umumnya.

C. Kondisi Alfamart di Kabupaten Gowa

Kota Makassar adalah salah satu kota kawasan timur yang membuktikan perkembangan industry ritel yang cukup relevan, dengan jumlah Minimarket yang makin meningkat. Apalagi tingkat perkembangan minimarket telah mencapai 166 outlet.

Kota Makassar telah memiliki Peraturan Daerah No. 15 tahun 2009 tentang Perlindungan, Pemberdayaan Pasar Tradisional dan penataan Pasar Modern⁵⁴ di Kota Makassar namun Peraturan Daerah tersebut belum berisikan aturan yang lebih jelas tentang pemberdayaan dan perlindungan pasar tradisional serta pengaturan pasar modern agar kedua sector ritel ini dapat beroperasi secara seimbang.

⁵⁴ Perda No 15 tahun 2009

Pertumbuhan pasar bisnie ritel modern terutama minimarket berjarangan yang cukup relevandi kota Makassar, Maros dan Gowa dengan lokasi yang strategis mampu melangsungkan usaha pasar tradisional dan usaha ritel kecil. Menurut permasalahan ini, perlu melakukan audiensi dengan pemerintah daerah. Dalam hal ini Bupati Kabupaten Gowa terkait kebijakan daerah Kabupaten Gowa tentang perlindungan, pemberdayaan pasar tradisional dan penataan pasar modern di Kabupaten Gowa. Dalam tahap-tahap perumusan kebijakan, suatu keputusan kebijakan mencakup tindakan oleh seorang pejabat atau lembaga resmi untuk menyetujui, atau mengubah, atau menolak suatu alternative kebijakan yang di pilih. Pengaturan lokasi minimarket dalam Pasal 5 ayat (4) Perpres 112 Tahun 2007 Tentang Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern disebutkan bahwa minimarket boleh berlokasi pada setiap sistem jaringan jalan, termasuk sistem jaringan jalan lingkungan pada kawasan pelayanan lingkungan (perumahan) di dalam kota/ perkotaan. Artinya, minimarket bisa membukai gerai hingga ke wilayah pemukiman warga.⁵⁵ Kemudian, Pasal 3 ayat (9) Permendag 53 Tahun 2008 Tentang Pedoman Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern menyebutkan kewajiban bagi minimarket yaitu Pendirian Minimarket baik yang berdiri sendiri maupun yang terintegrasi dengan Pusat Perbelanjaan atau bangunan lain wajib memperhatikan:

⁵⁵Pasal 11 Permendag No. 53/M-DAG/PER/12/2008 Tahun 2008 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern- "Permendag Nomor 53 Tahun 2008 .

- a. Kepadatan penduduk;
- b. Perkembangan pemukiman baru;
- c. Aksesibilitas wilayah (arus lalu lintas);
- d. Dukungan/ketersediaan infrastruktur; dan
- e. Keberadaan Pasar Tradisional dan warung/toko di wilayah sekitar yang lebih kecil daripada Minimarket tersebut.⁵⁶

Namun, Permendag 53/2008 tidak mengatur konsekuensi ataupun sanksi apabila kewajiban di atas dilanggar. Pelaksanaan pengawasan toko modern diserahkan kepada Bupati/Walikota. Tentang jarak minimarket diatur pula di dalam peraturan perundang-undangan di tingkat daerah . Berdasarkan Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional (IUP2T), Izin Usaha Pusat Perbelanjaan(IUPP) dan Izin Usaha Toko Modern (IUTM) adalah izin untuk dapat melaksanakan usaha pengelolaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah setempat. Dalam kaitannya dengan Peraturan Zonasi tersebut merupakan ketentuan-ketentuan pemerintah daerah setempat yang mengatur pemanfaatan ruang dan unsur-unsur pengendalian yang disusun untuk setiap zona peruntukan sesuai dengan rencana rinci tata ruang.⁵⁷

⁵⁶Fadillah Wulandari, *Analisis Kebijakan Pemerintah Dalam Penetaan Minimarket di Kota Palopo*, Skripsi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin 2015. h. 42.

⁵⁷Saraswati, *Analisis Dampak Keberadaan Minimarket Indomaret dan Alfamart Terhadap UKM dalam kaitannya dengan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern* (Studi Di Kota Pontianak), Skripsi.

Lokasi untuk Pendirian Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern wajib mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Kota dan Rencana Detail Tata Ruang Kota Makassar khususnya Kabupaten Gowa keamatan Somba Opu, termasuk peraturan zonasinya. Kota yang belum memiliki Rencana Tata Ruang Wilayah Kota dan Rencana Detail Tata Ruang Kota “tidak diperbolehkan” memberi izin lokasi untuk pembangunan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern. Pelaku usaha yang akan melakukan kegiatan usaha di bidang Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, wajib memiliki:

1. IUP2T untuk Pasar Tradisional;
2. IUPP untuk Pertokoan, Mall, Plasa dan Pusat Perdagangan;
3. IUTM untuk Minimarket, Supermarket, Department Store, Hypermarket dan Perkulakan Kebijakan.⁵⁸

Minimarket yakni Alfamart tidak begitu saja membangun dan mengembangkan perusahaan mereka di Kabupaten Gowa tanpa ada pertimbangan. Menurut pernyataan informan yakni Pak Idwar sebagai Kepala Toko Alfamart jln Masjid Raya Sungguminasa Gowa :

*”Kondisi retail alfamart yaitu masalah izin di kantor bupati yang susah, ada beberapa titik yang dibangun di Gowa itu tidak dapat izin”.*⁵⁹

Pemerintah kabupaten Gowa telah memberi izin atas pembangunan Alfamart namun dibatasi, dan harus mengikuti persyaratan yang ada. Seperti

⁵⁸Saraswati, *Analisis Dampak Keberadaan Minimarket Indomaret dan Alfamart Terhadap UKM dalam kaitannya dengan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern* (Studi Di Kota Pontianak), Skripsi.

⁵⁹Kepala Toko Alfa Mart, Idwar, diwawancarai pada 21 November 2019 pukul 14.51

yang dipaparkan oleh Pak H. Muh. Rais, S.Sos, M.Si Kepala Bidang Perdagangan yang menyatakan :

”Peraturan daerah mengenai penataan belum ada, yang ada perda kota makassar. Kami menjadikan Perda kota makassar sebagai acuan, alfamart itu di batasi per satu desa satu alfamart, satu desa satu kelurahan, pedagang-pedagang ekonomi kerakyatan sehingga Gowa itu tidak sama dengan kabupaten lainnya seperti takalar tumbuh dimana-mana”⁶⁰

Dari hasil wawancara tersebut dapat kita simpulkan bahwa keberadaan pasar ritel ini terkhusus alfamart masih belum terstruktur dengan baik di kabupaten gowa dikarenakan area dan wilayah tersebut masih belum mendapat izin dari pemerintah setempat karena masih dibatasi agar masyarakat yang ada disana juga dapat berdagang dan berjualan.

Di lihat dari masa pemerintahan Bpk. Ichsan Yasin Limpo, Bupati Gowa sebelum Bpk. Adnan Purichta Icshan. Bpk Icshan Yasin Limpo mengatakan bahwa kekuatan pertumbuhan ekonomi bangsa Indonesia terletak pada sector UMKM/ perdagangan tradisonal yang secara nyata menjadi penyokong pertumbuhan ekonomi pada saat kritis ekonomi terjadi pada tahun 1998-2008.⁶¹

Dari pihak pemerintah sendiri memang sudah memberikan izin khususnya Pak Bupati namun sangat membatasi untuk Minimarket yakni Alfamart untuk berkembang di Kabupaten Gowa. Hal itu dikarenakan masyarakat merasa terbantu akan kebutuhannya dengan keberadaan minimarket yakni Alfamart.

⁶⁰Muhammad Rais diwawancarai pada 04 februari 2020 pukul 14.38

⁶¹ KPPU.go.id, diakses pada tanggal 21 Maret 2020,
<https://kppu.go.id/blog/2011/10/audiensi-bupati-gowa-evaluasi-dan-kajian-dampak-kebijakan-persaingan-usaha-dalam-industri-ritel-di-sulawesi-selatan-khususnya-di-kabupaten-gowa/>

Sampai saat ini Kabupaten Gowa belum memiliki Peraturan Daerah (perda) yang khusus mengatur tentang penataan pasar modern dan pasar tradisional namun Pemerintah Kabupaten Gowa masih dapat mengatasi masalah tersebut melalui tindakan-tindakan pengaturan terkait pemberian izin operasi ritel modern khususnya minimarket berjaringan.⁶²

1. Kebijakan Pemerintah dalam Penataan Mini Market

Dalam Perpres No 112 tahun 2007 tentang Pendirian pusat perbelanjaan dan toko modern wajib memperhatikan kondisi ekonomi masyarakat, sedangkan dalam Permendag No 53/M-DAG/PER/12/2008 tentang pedoman penataan dan pembinaan pasar modern dan pusat perbelanjaan dalam permendag ini terkandung bahwa munculnya masalah dan peraturan mengenai kemitraan persyaratan dan pembinaan serta pengawasan yang jadi titik focus.

Beranjak beralih pada perundang-undangan Perpres serta Permendag sehingga Kota Makassar mengeluarkan Perdano 15 tahun 2009 tentang perlindungan pemberdayaan pasar tradisional dan penataan pasar modern dapat sejalan dan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku tetapi tetap memperhatikan dari unsur keadilan dalam penataan tersebut, sehingga bisa menjadi tumpuan yang positif dalam memajukan terciptanya dunia usaha yang efektif dan dapat meningkatkan lapangan kerja di Makassar.

⁶² KPPU.go.id, diakses pada tanggal 21 Maret 2020,
<https://kppu.go.id/blog/2011/10/audiensi-bupati-gowa-evaluasi-dan-kajian-dampak-kebijakan-persaingan-usaha-dalam-industri-ritel-di-sulawesi-selatan-khususnya-di-kabupaten-gowa/>

System Ekonomi Sosialisme merupakan suatu hal yang sangat menyangkut tentang aspek hidup masyarakat secara luas. System Ekonomi juga adalah suatu kebijakan yang dapat menolong masyarakat. Mendahulukan kepentingan orang banyak. Dimana peran pemerintah dibutuhkan, dengan mengutamakan perekonomian Negara. Sehingga muncul kebijakan untuk pemerataan perekonomian.

Kebijakan yang dikeluarkan Pemerintah Kota Makassar agar Perda kota Makassar No 15 Tahun 2009, dapat disosialisasikan sehingga setara dengan Perpres No 112 Tahun 2007 tentang penataan dan penmbinaan pasar tradisional pusat perbelanjaan dan toko modern dan Permendag No 53/2008.

Pemerintah daerah adalah pihak yang paling berwenang dalam mengatur dan mengeluarkan sebuah kebijakan. Pemerintah juga berhak untuk mengontrol jalannya sebuah kebijakan di daerah. Pelaksanaan fungsi pengaturan dikenal sebagai fungsi regulasi dengan segala bentuknya, dimaksudkan sebagai usaha untuk menciptakan kondisi yang tepat.

Dalam penyusunan kebijakan pemerintah daerah harus mengaju kepada berikut:

1. Berpedoman pada kebijaksanaan
2. Konsisten dengan kebijaksanaan yang lain yang berlaku
3. Berorientasi kemasa depan.
4. Berpedoman kepada kepentingan umum.
5. Jelas dan tepat serta transparan

6. Dirumuskan secara tertulis⁶³

Berdasarkan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan mini market adalah peraturan presiden No. 112 tahun 2007 dan peraturan metnri dan perdagangan No. 53 tahun 2008 pasal 1 ayat 7,8,9 dan 10.

Masuknya Minimarket di Kabupaten gowa khususnya Alfamart merupakan kebijakan yang telah di putuskan oleh pemerintah Kabupaten Gowa. Memberikan izin untuk Pembangunan Alfamart untuk berkembang di Kabupaten Gowa. Kemudian Pak H. Muh Rais, S.Sos, M.Si, melanjutkan percakapannya, beliau mengatakan:

"Kebijakan pemerintah daerah di masa jabatan pak icshan yasin limpo memang sudah membatasi dengan cara satu desa satu kelurahan yang ada di kabupaten gowa. Sekarang ini ada 3, Somba Opu, Palangga dan Bajeng itu saja masih di batasi dan sekarang sudah di tutup di kabupaten Gowa".⁶⁴

Dari pernyataan Pak Muh. Rais diatas bahwa perkembangan pembangunan minimarket khususnya Alfamart di kabupaten Gowa cukup Cepat. Meski dibatasi namun pembangunan sudah ada di beberapa kecamatan.

Implementasi kebijakan perencanaan toko modern seperti halnya dalam proses formulasi yaitu bersifat pilihan rasional dan top down. Perencanaan penataan toko modern merupakan kebijakan yang cukup di implementasikan di kabupaten gowa terbukti dengan adanya audiensi dengan pemerintah daerah, dalam hal ini Bupati Kabupaten Gowa terkait kebijakan daerah tentang perlindungan, pemberdayaan pasar tradisional, dan penataan pasar modern di

⁶³Fadillah Wulandari, Analisis Kebijakan Pemerintah Dalam Penetaan Minimarket di Kota Palopo, Skripsi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin 2015.

⁶⁴Muhammad Rais diwawancarai pada 04 Februari 2020 pukul 14.38

Kabupaten Gowa. Implementasi yang bersifat pilihan nasional berkaitan erat dengan pembuat kebijakan. Implementasi yang bersifat top down ditunjukkan dengan adanya bukti bahwa adanya audiensi dari Pemkab.. kebijakan pembatasan ritel bisnis ritel modern ini tentunya diusahakan memberikan solusi pada pihak-pihak yang berkepentingan yaitu:

1. Pedagang ritel tradisional tidak terancam
2. Ritel modern (Minimarket) yang diperlukan kalangan tertentu yakni menyediakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat
3. Pemerintah local sebagai pihak yang berwenang dalam menentukan kebijakan.

Perizinan merupakan salah satu perwujudan tugas mengatur dari pemerintah. Pengertian izin menurut definisi yaitu perkenan atau pernyataan mengabulkan. Sedangkan istilah mengizinkan mempunyai arti perkenankan, memperbolehkan dan tidak melarang.⁶⁵

Izin ialah suatu persetujuan dari Pemerintah berdasarkan Undang-undang atau peraturan pemerintah untuk keadaan-keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan peraturan perundang-undangan. Izin diberikan pengertian sebagai dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan daerah atau peraturan lainnya sehingga dapat disebutkan sebagai bukti legalitas, diperbolehkan untuk melakukan usaha. Dengan memberi

⁶⁵<http://wonkdermayu.wordpress.com/kuliah-hukum/hukum-perijinan/>, diakses pada hari jumat tanggal 23 Oktober 2020 jam 12.35 wita

izin yang dapat dilakukan pemerintah untuk mengendalikan dan mengontrol kegiatan masyarakat.

Pertumbuhan pasar ritel modern terutama minimarket berjaring yang cukup signifikan di Kabupaten Gowa dengan lokasi yang strategis ditengarai mengancam kelangsungan usaha pasar tradisional dan usaha ritel kecil. Berdasarkan permasalahan tersebut, kantor perwakilan Daerah merasa perlu melakukan audiensi dengan pemerintah daerah, dalam hal ini Bupati Kabupaten Gowa terkait kebijakan daerah Kabupaten Gowa tentang perlindungan, pemberdayaan pasar tradisional, dan penataan pasar modern di Kabupaten Gowa. Dalam audiensi tersebut bapak Ichsan Yasin Limpo, selaku Bupati Gowa, mengatakan bahwa kekuatan pertumbuhan ekonomi bangsa Indonesia terletak pada sector UMKM/ perdagangan tradisional yang secara nyata menjadi penyokong pertumbuhan ekonomi pada masa kritis ekonomi terjadi pada tahun 1998-2008.⁶⁶

Sampai saat ini Kabupaten Gowa memang belum memiliki Perda yang khusus mengatur tentang penataan pasar modern dan pasar tradisional tetapi Pemkabn Gowa masih dapat mengatasi masalah tersebut melalui tindakan-tindakan pengaturan terkait pemberian izin operasi ritel modern khususnya Minimarket berjaringan.

⁶⁶KPPU.go.id, diakses pada tanggal 21 Maret 2020, <https://kppu.go.id/blog/2011/10/audiensi-bupati-gowa-evaluasi-dan-kajian-dampak-kebijakan-persaingan-usaha-dalam-industri-ritel-di-sulawesi-selatan-khususnya-di-kabupaten-gowa/>

Bpk Ichsan Yasin Limpo mengatakan bahwa Kabupaten Gowa tidak melarang kehadiran ritel Modern (Minimarket berjaringan) untuk masuk dan berkembang di Kabupaten Gowa, tetapi Pemerintah Kabupaten Gowa memiliki kewenangan untuk mengatur jumlah dan letak dari ritel modern tersebut (Minimarket berjaringan) agar tidak mematikan pasar tradisional yang dikelola secara tradisional yang menyerap banyak tenaga kerja, bpk Ichsan Yasin Limpo mengkhawatirkan apabila sektor ritel modern diberikan izin secara bebas maka kondisi ini berdampak langsung terhadap matinya pasar tradisional dan usaha ritel tradisional sebagaimana yang terjadi di kota besar seperti Jakarta.⁶⁷

Pemberian kewenangan juga harus memperhatikan persoalan sinkronisasi dan harmonisasi peraturan daerah. Pengawasan terhadap peraturan agar tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Dimana pemerintah menciptakan rakyat yang adil.

Terkait dengan masuknya ritel modern di Kabupaten Gowa Bpk Ichsan Yasin Limpo mengatakan adanya kesepakatan rapat MUSPIDA kabupaten Gowa terkait kebijakan pengaturannya pasar modern, antara lain seperti kebijakan pembatasan pemberian izin minimarket pada wilayah tertentu dan jarak antara minimarket berjaringan dengan pasar tradisional (Kurang Lebih 2,5 kilometer) serta jarak antar minimarket berjaringan (zonasi).

⁶⁷KPPU.go.id, diakses pada tanggal 21 Maret 2020,
<https://kppu.go.id/blog/2011/10/audiensi-bupati-gowa-evaluasi-dan-kajian-dampak-kebijakan-persaingan-usaha-dalam-industri-ritel-di-sulawesi-selatan-khususnya-di-kabupaten-gowa/>

Selain itu Bupati Gowa menjelaskan peran serta masyarakat sekitar untuk terlibat langsung dalam sector ritel modern dengan melibatkan pihak perbankan dalam memberikan pinjaman KUR kepada toko-toko tradisional agar dapat dikembangkan menjadi minimarket local. Dengan ketelibatan masyarakat sekitar diharapkan sector ritel modern bukan hanya didominasi oleh perusahaan dengan modal besar tetapi menyebar dengan keterlibatan pelaku usaha local berskala kecil. Dengan cara ini bpk Icsan Yasin Limpo berharap jikaalaupun masyarakat beralih kepasar modern (Minimarket berjaringan) tidak akan membawa pengaruh yang besar karena industry-industri kecil pun jalan.⁶⁸

Kehadiran pasar modern dengan Market Power yang sangat besar, berbasis capital, mampu menggerus setiap lawan termasuk toko tradisional. Berbagai strategi bisnis yang dikembangkannya untuk menopang brand image sebagai ritel penyedia barang dengan harga termurah di Indonesia, selalu menjadi trend dalam pengelolaannya di Indonesia. Dalam berbagai hal harus diakui bahwa minimarket telah berkembang menjadi trend setter bisnis ritel Indonesia.⁶⁹

D. Dampak Ekonomi dan Politik Alfamart di Kabupaten Gowa tentang Minimarket

Keberadaan Minimarket membawa dampak dari berbagai sisi, yakni dapat dilihat dari titik Fokus peneliti yakni Ekonomi Politik. Liberalisme berperan

⁶⁸KPPU.go.id, diakses pada tanggal 21 Maret 2020, <https://kppu.go.id/blog/2011/10/audiensi-bupati-gowa-evaluasi-dan-kajian-dampak-kebijakan-persaingan-usaha-dalam-industri-ritel-di-sulawesi-selatan-khususnya-di-kabupaten-gowa/>

⁶⁹Saraswati, *Analisis Dampak Keberadaan Minimarket Indomaret dan Alfamart Terhadap UKM dalam kaitannya dengan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern* (Studi Di Kota Pontianak), Skripsi, h. 21

penting di ekonomi polotik. Dimana liberalisme merupakan kritikan terhadap peran pemerintah dalam suatu system perekonomian yang terjadi di kabupaten Gowa. Liberalism berkembang sesuai dengan dinamika interaksi pasar. Dimana Peran pemerintah harus maksimalkan. Namun keberadaan Minimarket menimbulkan dampak, yakni dampak ekonomi dan politik Alfamart di kabupaten Gowa tentang minimarket di antaranya adalah:

1. Dampak Ekonomi

Perkembangan Ekonomi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan nilai tambah bruto seluruh barang dan jasa terciptadi wilayah domestic suatu daerah yang muncul akibat berbagai aktifitas ekonomi tanpa memperhatikan factor produksi dimiliki residen atau non residen.

Beberapa minimarket yang di bangun salah satunya Alfamart yang mengatasmakan untuk kemakmuran pekerja serta kepentingan konsumen. Minimarket di Gowa mulai berkembang. Berikut ini wawancara dengan kepala toko Alfamart Sungguminasa:

“Alfamart sangat membantu masyarakat, contoh dalam 1 tokoh itu ada beberapa karyawan, kita ambil contoh 5 orang ada berapa keluarga yang bisa dihidupi, hitung saja 1 orang, dia punya rumah, dalam satu rumah itu ada berapa orang uyang bisa dia biayai, adiknya, kakaknya, ibunya, bapaknya”⁷⁰

Ditambah dengan pernyataan dari sekretaris Kepala Toko Alfamart yakni Kak Jabenur

⁷⁰Kepala Toko Alfa Mart, Idwar, diwawancarai pada 21 November 2019 pukul 14.51

“sangat membantu yang pertama yaitu mengurangi angka pengangguran dan menjadi peluang usaha bagi anak-anak yang sudah fasianya di alfamart”⁷¹

Dari hasil wawancara ini menunjukkan proses kehadiran Alfamart telah membuka lapangan kerja bagi masyarakat di Kabupaten Gowa. Terbukanya lapangan kerja ini sebagai akses ekonomi masyarakat. Dimana masyarakat Kabupaten Gowa sudah mencapai kemandirian ekonomi masyarakat.

Disatu sisi munculnya minimarket yakni Alfamart memiliki dampak yang baik. Hal ini dapat dibuktikan adanya pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dan menciptakan investasi, namun disisi lain dapat menyebabkan kegelisahan para pedagang tradisional sehingga munculnya persaingan. Seperti yang dipaparkan oleh Pak Muh.Rais sebagai bidang perdagangan :

“Selaku Pembina selalu 1.Mengawasi 2.menyampaikan apabila mereka mau izin masalah pembangunan, kita upayakan mereka memasukna 20 persen adalah di ambil dari hasil perdagangan yang ada di kabupaten gowa”⁷²

Dapat disimpulkan bahwa kehadiran pasar modern atau minimarket ini sangat besar dan sangat membantu perekonomian di kabupaten Gowa itu sendiri. Namun ada juga Dampak Negatif yang didapat atas berdirinya Minimarket yakni sebagai Berikut:

- a) Berkurangnya konsumen yang berbelanja di UKM

Dengan adanya Minimarket diantara UMKM maka kecenderungan pembeli atau konsumen pun memilih tempat untuk berbelanja. Pembeli

⁷¹Sekretaris Kepala Toko Alfamart, Jabenu, diwawancarai pada 21 November 2019 pukul 14.51

⁷²Muhammad Rais diwawancarai pada 04 februari 2020 pukul 14.38

menganggap minimarket sebagai tempat yang sangat nyaman dan menarik dan juga pelayanannya dibanding dengan berbelanja di Toko Kecil. Alfamart membuat munculnya persaingan antara Toko Modern dengan pedagang Kecil, Hal ini menyebabkan pedagang toko kecil merasa terganggu, menurut pernyataan informan Deng Paleng umur 64, penjual :

*“Sejak ada alfamart pembeli saya cukup berkurang, karena mereka lari ke alfamart mungkin karena fasilitas yang amat nyaman yang ada di alfamart”.*⁷³

Dengan adanya minimarket maka kecenderungan konsumen pun memilih minimarket untuk berbelanja. Konsumen memandang minimarket sebagai tempat menarik dibandingkan ditempat toko-toko kecil. Selain menarik, pelayanan yang diberikan cukup baik serta fasilitas yang mendukung. Terdapat beberapa hal yang membuat minimarket diminati dan di kunjungi masyarakat atau konsumen. Pertama, fasilitas dimana minimarket memiliki fasilitas-fasilitas yang lebih seperti AC dan Musik yang membuat konsumen merasa nyaman dan betah untuk berbelanja di minimarket. Hal ini menyebabkan konsumen suka berbelanja di minimarket, menurut pernyataan informan:

*”Sejak hadirnya minimarket, saya sebagai konsumen lebih memilih berbelanja disana (minimarket), selain murah apalagi sering ada promo membuat saya lebih memilih berbelanja disana. Selain murah, disana enak ada AC jadi dingink, bersih, dan pelayanannya juga ramah-ramah”.*⁷⁴

⁷³Daeng Paleng (Pedagang kaki lima) diwawancarai pada 22 November 2019 pukul 13.15.

⁷⁴Fida, Ibu Rumah Tangga (Konsumen Alfa Mart) diwawancarai pada 22 November 2019 pukul 13.57

Bersih, instan, fasilitas yang sangat memadai merupakan deretan menjadi alasan mengapa masyarakat lebih menyukai berbelanja di minimarket dibandingkan dengan toko tradisional.

Kedua dimana minimarket banyak memberi potongan harga yang membuat harga barang relative lebih murah dan yang paling penting adalah pelayanan terhadap konsumen, dimana minimarket memberikan pelayanan yang sangat bagus, misalnya penyambutan, kesopanan sampai dengan mencari barang yang diinginkan konsumen.

Berdasarkan hasil wawancara dari Ibu Anti, umur 33, penjual beliau mengatakan:

*"Walaupun saya seorang penjual (toko kecil), tapi saya juga sering belanja di alfamart karena biasa di alfamart menjual barang murah seperti kalau lagi nah promosikan depan toko itu barang yang mau kadaluarsa, sebelum 2 bulan kadaluarsa itu barang dijual murah, jadi banyak pembeli termasuk saya"*⁷⁵.

Dampak yang dirasakan oleh pemilik usaha yakni pedagang kaki lima ini memang ada dan benar-benar dirasakan. Sebagai penjual kaki Lima ibu Anti merasa tersaingin namun tetap berbelanja ke Alfamart terutama jika Alfamart melakukan promosi dan diskon terhadap barang kebutuhan pokok.

Namun ternyata tidak semua barang yang ada di minimarket lebih murah dari yang dijual toko kecil, ada juga beberapa konsumen memang menyukai fasilitas dan pelayanan minimarket, menurut pernyataan informan

⁷⁵ bu Anti, Ibu Rumah Tangga (Pedagang kaki lima) diwawancarai pada 22 November 2019 pukul 13.57

*“Suka dan senang berbelanja di minimarket karena pelayanannya yang ramah, baik. Dan fasilitas yang disediakan cukup memuaskan seperti AC. Cuma yang tidak disukai bayar parkirnya”.*⁷⁶

Pemberian kenyamanan yang dilakukan toko modern yakni Alfamart terhadap pembeli sangat terbenahi fasilitas yang sangat memadai. Mulai dari keamanan, kebersihan yang dirasakan oleh pembeli.

Selain itu sebagian besar Masyarakat Kabupaten Gowa Menganggap kehadiran Minimarket ini sebagai pencaharian sehingga ekonomi masyarakat cukup berkembang.

Kebutuhan perusahaan terhadap karyawan dengan persyaratan pada penerimaan karyawan dengan pendidikan terakhir minimal SMA memudahkan masyarakat untuk mendapatkan kesempatan kerja menjadi karyawan toko Alfamart. Melihat hal tersebut sebagai kesempatan untuk kaum muda seperti lulusan SMA yang memutuskan untuk bekerja dan tidak melanjutkan studinya. Kebanyakan karyawan toko Alfamart hanya lulusan SMA. Berikut ini wawancara dengan kepala toko Alfamart Sungguminasa :

*“sekarang Alfamart itu mulai masuk ke sekolah-sekolah, yang untuk magang, dia masuk ke alfamart, setelah magang, yang tadi magang itu langsung diterima, dan grate, lavel dia langsung diterima dan dilanjutkan tanpa mengikuti traning-traning. Setelah melakukan magang sekitr 5-6 bulan.”*⁷⁷

Kesibukan pada pekerjaan mereka mengurus tenaga dan waktu digunakan untuk bekerja, pendidikan yang hanya lulusan SMA dan masih berada pada tahap

⁷⁶ bu Anti, Ibu Rumah Tangga (Pedagang kaki Lima) diwawancarai pada 22 November 2019 pukul 13.57

⁷⁷Kepala Toko Alfa Mart, Idwar, diwawancarai pada 21 November 2019 pukul 14.51

pendewasaan maka perhatian mereka terhadap politik juga kurang. Informasi yang mereka dengar tentang politik dan kegiatan-kegiatan politik hanya didapat sekilas dari media yang sekilas terlintas ketika mereka sedang bekerja atau pun sedang beristirahat adapun informasi yang didapat dari teman-teman dan keluarga hanya karena kebetulan mereka berada ditempat itu.

Yang terpenting bagi seorang karyawan adalah pekerjaan selain dari pada itu seperti politik tidak ada hubungannya dengan pekerjaan dalam meningkatkan penghasilan mereka, melainkan keseriusan mereka bekerja yang berbuah hasil perbulanya. Kebijakan-kebijakan pemerintah yang dikeluarkan juga tidak berpengaruh pada penghasilan perbulanya. Tuntutan ekonomi menjadikan sebagai pandangan bahwa segala sesuatunya dikesampingkan demi mendapatkan hasil dan dapat menafkahi keluarga yang ditinggalkan di kampung halaman.

b) Berkurangnya Pendapatan UMKM

Pada dasarnya para pedagang UMKM mempunyai penapat yang cukup untuk mengembangkan usahanya. Namun setelah kehadiran Minimarket secara perlahan pendapatannya berkurang seiring dengan berkurangnya pembeli, hal ini mengakibatkan sepi pembeli sehingga sangat berpengaruh terhadap pendapatan pedagang kecil.

Banyak hal yang harus diperhatikan oleh pemerintah terhadap apa yang terjadi di masyarakat, khususnya pedagang kecil. Hal yang paling penting harus diperhatikan oleh pemerintah saat menerima masuknya minimarket seperti alfamart yakni keberlangsungan pedagang kecil dan pasar tradisional. Seperti

yang di paparkan oleh salah satu pedagang kecil, Deng Paleng umur 64, penjual beliau mengatakan:

*”Sejak ada Alfamart pembeli saya cukup berkurang, karena mereka lari ke Alfamart mungkin karena fasilitas yang amat nyaman yang ada di Alfamart.”*⁷⁸

Dari pernyataan ibu penjual UKM diatas dapat kita ambil kesimpulan ng bahwa dampak dari keberadaan Alfamart itu sendiri mengurangi penghasilan para usaha menengah kebawah atau pedagang kaki lima.

Pernyataan itu diperkuat pengakuan dari pedagang kecil yang tokonya tidak jauh atau berdekatan dengan Alfamart. Salah satu pedagang kecil ini telah berjualan selama 16 tahun.

“untuk dampak yang kita rasakan yaitu terjadinya penurunan omset dan penurunan pembeli. Persaingan begitu terasa kuatnya. Dampaknya sangat parah”

Inilah yang terjadi pada pedagang kaki lima setelah adanya minimarket yakni Alfamartdidekat mereka berada. Konsumen yang beralih ke toko modern yakni Alfamart membuat sepiya pelanggan bahkan mereka tidak membuka penuh tokonya. Persaingan tidak sempurna ini terjadi pada pedagang tradisiobal dan toko modern , begitu sangat terlihat dan membawa dampak yang sangat luar biasa bai toko tradisional itu sendiri.

⁷⁸Daeng Paleng (Pedagang Kkai Lima) diwawancarai pada 22 November 2019 pukul 13.15.

1. Dampak Politik

Semakin banyaknya Minimarket, membuat pemerintah untuk mengeluarkan regulasi untuk mengatur keberadaan toko modern dan agar keberadaanya member dampak positif bagi masyarakat dan Negara. Regulasi tentang toko toko modern ada dua tingkat yaitu regulasi tingkat nasional dan regulasi tingkat daerah.

a. Regulasi Tingkat Nasional

Dimulai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.⁷⁹

Peraturan presiden ini mengatur zonasi antara Minimarket dengan Pasar Tradisional, bagaimana perlindungan terhadap pasar tradisional, bagaimana supaya pengaturan lokasi Pasar Tradisional dan Ritel Modern menjadi lebih Baik. Dapat dilihat seperti lokasi, bangunan, pemasokan barang, jam operasional, pembinaan dan pengawasan serta sanksi agar pasar atau toko tradisional dapat terus berkembang, tumbuh, maju dan tercipta persaingan yang tertib. Seperti yang di katakan Kak Jabenur sebagai Asisten Kepala Toko Alfamart Jalan Masjid Raya, Sungguminasa Kabupaten Gowa :

“Sebelum Alfamart itu berdiri, ada namanya survey lokasi, harus ada izin 10 tetangga kanan, 10 tetangga kiri, kalau tidak dapat izin, kita tidak bisa buka, harus dapat izin dulu sebelum berdiri Alfamart.”⁸⁰

⁷⁹ Peraturan Presiden 112 tahun 2007

⁸⁰ Sekretaris Kepala Toko Alfa Mart, Jabenur, diwawancarai pada 21 November 2019 pukul 14.51

Dampak politik dan ekonomi alfamrt terhadap minimarket dapat dibaca dari gerakan dan usaha ALfamart yang termasuk darpd strategi melakukan ekspansi produk-produk yang mampu menarik masyarakat kecil agar datang belanja di alfamart. Strateginya dapat di pahami dari salah satu pernyataan narasumber Kepala Toko Alfamart sebagai berikut,

“Strategi alfamart, yaitu ada dua pelayanan ada yang langsung dan ada yang tidak langsung, yang langsung pada saat konsumen masuk dengan melakukan penawaran di kasir, penawaran tidak langsung itu kita mengacu kenyamanan di toko yaitu AC, kelengkapan harga yang tersedia dan juga lewat promosi dalam dua periode , ada dua minggu ada yang namanya riflet terus program JSM. Lewat JSM kita sudah sebar brosurnya atau frifletnya begitupun sebelum masuk promo, contoh 2 minggunya kita sudah rifletnya”⁸¹.

Alfamart sendiri memilikisistem distribusi yang dirancang secara seefisien mungkin dengan pemasok yang handal dan menyediakan produk berkualitas dan terkenal. Strategi yang dimaksud untuk strategi pemasaran dengan kegiatan promosi. Secara berskala sangat menjalan program promosi dengan berbagai cara yakni memberikan harga diskon, undian berhadiah maupun hadiah langsung.

Pemerintah daerah di himbau agar dapat mengembangkan pasar tradisional dengan cara mengupayakan alternative sumber pendanaan dan pengelolah pasar tradisional. Serta memberdayakan pusat perbelanjaan dan toko modern dalam membina pasar tradisional.

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 53/M/Dag/Per/12/2008. Tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern. Peraturan ini mengatur berbagai persyaratan cara pendirian pasar

⁸¹Kepala Toko Alfa Mart, Idwar, diwawancarai pada 21 November 2019 pukul 14.51

tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern sebagaimana yang diamanahkan pada pasal 14 peraturan presiden republic Indonesia nomor 112 tahun 2007 antara lain :

- 1) Lokasi pasar tradisional
- 2) Kemitraan usaha
- 3) Batasan luas lantai penjualan toko modern
- 4) Jenis dan kewenangan penerbitan izin
- 5) Pelaporan Pemberdayaan pasar tradisional
- 6) Pembinaan dan pengawasan
- 7) Sanksi⁸²

Aturan ini menyatakan untuk pendirian pasar tradisional maupun modern perlu didasari analisis kondisi social ekonomi politik. Pemerintah juga mendorong kerjasama anat7hara Minimarket atau toko modern dengan pasar tradisional atau toko kecil mengutamakan pasokan barang.

b. Regulasi Tingkat Daerah

Kota Makassar mengeluarkan Peraturan Daerah, Salah satu Peraturan Daerah yang mengatur keberadaan Minimarket adalah Peraturan Daerah No 15 Tahun 2009⁸³ agar efektif Penggunaan perda dan upaya memaksimalkan perda berjalan sesuai amanah perundang-undangan yang berlaku, agar penataan pasar Modern atau Minimarket dengan pasar tradisonal bisa sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan Peraturan Presiden yang ada selama ini.

⁸² Pasal 14 Permendag No. 53/M/-DAG/PER/12/2008 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern- "Permendag Nomor 53 Tahun 2008.

⁸³Perda No 15 Tahun 2009.

Peraturan yang ada dijadikan dasar untuk pembangunan Alfamart yang ada di Kabupaten Gowa, Walaupun Terbatas namun kehadiran Pasar Retail Modern ini sangat-sangat berpengaruh terhadap masyarakat, dan memiliki nilai cukup Signifikan untuk perekonomian satu keluarga, seperti yang di paparkan kepala Toko Alfamart :

“Kalau pasar tradisional sendirian tidak semua barang yang bisa dia kafer untuk masyarakat seperti itu. Tergantung cara melihat apakah pasar itu menjual dimiliki Alfamart.”⁸⁴

Berdasarkan hasil pemaparan dari kepala toko, dapat kita ambil point bahwa segala kebutuhan masyarakat tidak serta merta didapatkan dipasar atau swalayan, tetapi kehadiran dari Alfamart untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan mudah didapatkan di gerai terdekat dari rumah.

Hampir sebagian Masyarakat berpikir jelek terhadap kehadiran Alfamart terkhusus Pedagang Kecil seperti Pasar tradisional. Pasar tradisional merasa tersaingi dengan kehadiran Pasar modern atau Minimarket.

Jika bisnis retail ini semakin berkembang dari tahun ketahun tanpa adanya peraturan-peraturan yang berlaku maka sangat berpengaruh dengan pasar tradisional.

Aktifitas politik dapat mempengaruhi individu atau kelompok untuk keikut serta dalam suatu kegiatan politik. Kehidupan karyawan toko seperti karyawan Alfamart sebagian besar kesahariannya di jalani di toko. Aktifitas yang menjadi kebiasaan seharinya mengaruskan fokus pada pekerjaan dimana dapat melayani pembeli dengan sebaik-baiknya sesuai prosedur yang di tentukan perusahaan.

⁸⁴Kepala Toko Alfa Mart, Idwar, diwawancarai pada 21 November 2019 pukul 14.51

Kesibukan yang dijalani membuat perhatian pada kegiatan lain tidak di perhatikan, belum lagi sebagai karyawan yang berasal dari luar daerah Makassar yang mengharuskan jauh dari keluarga.

*“politiknya itu dia netral, punya aturan sendiri, karyawan tidak di perbolehkan ikut memakai seragam, ikut partai, tidak kampanye”.*⁸⁵

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat kita ambil kesimpulan bahwa di bisnis ritel ini khususnya Alfamart tidak ada kegiatan atau aktivitas politik yang terjadi, semata-mata kehadiran dari toko ini hanya untuk kebutuhan ekonomi.

Berdasarkan dari wawancara yang dilakukan oleh pak Idwar ia dengan jelas mengatakan bahwa didalam bisnis ritel terkhusus Alfamart ini tidak ada aktivitas politik didalamnya. Semata-mata bisnis ini hanya ditujukan untuk kegiatan ekonomi.

Dalam kegiatan politik seperti pemilu, tidbk berpengaruh terhadap aktivitas orang-orang yang ada di alfamart. Dimana mereka menyikapi pemilu sesuai pilihan mereka masing-masing tanpa adanya dipengaruhi oleh pihak luar. Sehingga disimpulkan keberadaan Alfamart ini dibangun sesuai:

1. Prosedur dan Persyaratan Pemberian Izin Minimarket di Kabupaten GowaMengikuti peraturan presiden
2. Pengawasan Pemerintah Daerah terhadap Pelaksanaan Perizinan Minimarket di Kabupaten Gowa

⁸⁵Kepala Toko Alfa Mart, Idwar, diwawancarai pada 21 November 2019 pukul 14.51

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang didasarkan pada analisis data, dapat ditarik beberapa kesimpulan yang menunjukkan bahwa:

Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa mengizinkan masuk dan berkembangnya minimarket seperti Alfamart, ini membuktikan perkembangan cukup pesat di Kabupaten Gowa. Bahan pertimbangan bahwa masuknya Minimarket seperti Alfamart akan membuka Lapangan kerja baru bagi Masyarakat dan membantu masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Sampai saat ini belum ada Peraturan Daerah yang mengatur mengenai penataan minimarket di Kabupaten Gowa yang dijadikan acuan adalah Peraturan Presiden atau Peraturan Pusat.

Kehadiran pasar modern atau minimarket ini sangat besar dan sangat membantu perekonomian di Kabupaten Gowa itu sendiri. Namun ada juga Dampak Negatif yang didapat atas berdirinya Minimarket yakni Alfamart membuat munculnya persaingan antara Toko Modern dengan pedagang Kecil. Dampak politik dan ekonomi Alfamart terhadap minimarket dapat dibaca dari gerakan dan usaha Alfamart yang termasuk dalam strategi melakukan ekspansi produk-produk yang mampu menarik masyarakat kecil agar datang belanja di Alfamart.

B. Implikasi Penelitian

Keberadaan Alfamart di Kabupaten Gowa menyebabkan bisnis pasar ritel melonjak naik disertai dengan mudahnya masyarakat berbelanja di hampir setiap jalan namun disisi lain hal ini juga berdampak buruk bagi pedagang kecil-kecilan yang hanya meraup untung dari hasil jualan mereka yang tidak banyak dan sedikit.

Banyak hal yang harus diperhatikan oleh pemerintah terhadap apa yang terjadi di masyarakat, khususnya pedagang kecil. Hal yang paling penting harus diperhatikan oleh pemerintah saat menerima masuknya minimarket seperti alfamart yakni keberlangsungan pedagang kecil dan pasar tradisional itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Al-Karim

Imam Al-Bukhari, *Buku Shaih Al-Bukhari Jilid 1* Jakarta: Pustaka As-Sunnah, 2015

Undang-Undang No.32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

Pasal 14 Permendag No. 53/M/-DAG/PER/12/2008
tentang Pedoman Penataandan Pembinaan Pasar Tradisional,
Pusat Perbelanjaandan Toko Modern- "Permendag Nomor 53 Tahun 2008.

Peraturan Presiden 112 tahun 2007

Peraturan daerah No 15 Tahun 2009.

Aliefty Octavina, Mutiara. "Kepemimpinan Bupati dalam Meningkatkan
Pembangunan" (Studi tentang Kepemimpinan Bupati di
Kabupaten Bangkalan 2003-2013). Jurnal (Malang : Brawijaya, 2017.

Budi Santoso, Purbayu. Relevansi dan Aplikasi Aliran Ekonomi Kelembagaan,
Jurnal Ekonomi Pembangunan Vol.9, No.1, Juni 2008

Budi Winarno, Kebijakan Publik: Teori dan Proses, Yogyakarta: Media Pressindo, 2007.

David, Marsh dan Stoker Gerry. *Teori dan Metode dalam Ilmu Politik* (Bandung: Nusa Media, 2010.

Desi. "pembangunan", Yogyakarta : Lambung Pustaka UNY, 2013.

DR. Andriansyah, M.Si, *Kebijakan Publik*, Jurnal, 2016.

Fajar Ferdiansyah, Andi. *Politik Pembangunan (Studi terhadap pembangunan
Kawasan Industri Bantaeng di Kecamatan Pa'jukukang Kabupaten
Bantaeng)*, Skripsi, Makassar: Fakultas Ushuluddin Filsafat dan Politik
Universitas Alauddin Makassar, 2019.

Idrus, Muhammad. *Metode Penelitian Ilmu Sosial:
Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif* Jakarta: Penerbit Erlangga, 2009.

Ismail, Muh. "Kinerja Politik pemerintah Desa (Studi terhadap Perbaikan jalan
Desa di Desa Barayya Kecamatan Bontoromba Kabupaten Jeneponto).
Skripsi Makassar, UINAM, 2015.

- Mahera, Rayhan. *Pengaruh Keberadaan Minimarket Alfamart Terhadap Omset Penjualan Usaha Retail ditinjau Menurut Ekonomi Islam (Studi Kasus: Alfamart Jalan Delima, Kecamatan Tampan, Pekanbaru)*, Skripsi, Riau: Fak. Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, 2014.
- Murba, "Studi Implementasi Program Pembangunan Infrastruktur di Desa Erecinnong Kecamatan Bonto Cane Kabupaten Bone", Makassar: Fakultas Ushuluddin Filsafat dan Politik Universitas Islam Negeri Makassar 2017.
- N. Dunn, William. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik "Edisi Kedua"*, Yogyakarta, Gadjah Mada University Press, 2003.
- Nira Permata Sari, Elie "Pengaruh Kualitas Pelayanan, Persepsi Harga dan Lokasi Terhadap Keputusan Pembelian pada Pelanggan Minimarket (Studi Kasus pada Pelanggan Minimarket Alfamart Tayu Wetan, Tayu, Pati, Jawa Tengah)", Skripsi, Yogyakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Yogyakarta, 2017..
- Saladin, Djasmin. *Manajemen Pemasaran*, Cet. IV; Bandung: Linda Karya, 2006.
- Saraswati, *Analisis Dampak Keberadaan Minimarket Indomaret dan Alfamart Terhadap UKM dalam kaitannya dengan Peraturan Presiden Nomor Tahun 2007 Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Perbelanjaan dan Toko Modern (Studi Di Kota Pontianak)*, Skripsi, h. 21
- Silalahi, Ulber. *Metode Penelitian Sosial* (Bandung: Reflika Asitama, 2010).
- Aminah, Siti. "Negara dan Kesejahteraan (Analisis Ekonomi Politik Terhadap Hubungan antara PT. Surya Lestari II di Desa Waiputeh Kabupaten Mamuju Tengah)" Skripsi, Makassar, UINAM, 2017.
- Sjafrizal. *Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Era Otonomi*, Cet 3 Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016.
- Soehartono, Irawan. *Metode Penelitian Sosial: Salah Satu Teknik Penelitian Bidang Kesejahteraan Sosial dan Ilmu Sosial Lainnya* Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2011.
- Subarsono, AG. *Analisis Kebijakan Publik "Konsep, Teori, dan Aplikasi"*, 5 Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D* Bandung: Alfabeta, 2016.

Thoha, Miftah " *Kepemimpinan Dalam Manajemen* ", (Jakarta,: Rajawali Pers, 2009.

Tika, Zainuddin. *Profil Sejarah Budaya dan Pariwisata Kabupaten Gowa*, (Makassar: Pustaka Refleksi, 2000.

Usman. *Televisi, Kekerasan, dan Perempuan*. Jakarta; Kompas, 2009.

Warjio, Ph.D. " *Politik Pembangunan* ", Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2016.

Ms, Waristiono, Sadu. *Pemaparan Lanjutan Suplemen Penelitian Studi Kelayakan Pemekaran Wilayah Tangerang Selatan*, Ciputat: Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang, 2007.

Y. Andaya, Leonard. *Warisan Arung Palakka*, (Makassar: Ininawa, 2004.

Zahidaluthfa, Milla. " *Analisis Pengaruh Variabel Ekonomi dan Politik terhadap pertumbuhan Ekonomi di Indonesia* ", Yogyakarta: Fak. Ekonomi Universitas Islam Indonesia.

Internet:

Alfamartku.com. <https://blog.alfamartku.com/2016/10/13/sejarah-singkat-dan-alamat-alfamart-di-seluruh-indonesia/>. Diakses pada tanggal 21 Januari 20.02 wita.

HumasGowakab.go.id. <http://humas.gowakab.go.id/gowata/lambang>. Diakses Pada Tanggal 16 Januari 2020, pukul 21.25 Wita.

<http://wonkdermayu.wordpress.com/kuliah-hukum/hukum-perijinan/>, diakses pada hari jumat tanggal 23 Oktober 2020 jam 12.35 wita

KataData.co.id, Diakses Pada Tanggal 27 Januari 2019 Pada Pukul 11.51 WIB. <https://katadata.co.id/opini/2019/01/27/retail-minimarket-masih-tumbuh-1000-gerai-tiap-tahun>.

KPPU.go.id, diakses pada tanggal 21 Maret 2020, <https://kppu.go.id/blog/2011/10/audiensi-bupati-gowa-evaluasi-dan-kajian-dampak-kebijakan-persaingan-usaha-dalam-industri-ritel-di-sulawesi-selatan-khususnya-di-kabupaten-gowa/>

PT. Sumber Alfaria Trijaya Tbk. Dan Entitas Anaknya Diposting Pada Tanggal 31 Oktober 2018. https://www.idx.co.id/Portals/0/StaticData/ListedCompanies/Corporate_Actions/New_Info_JSX/Jenis_Informasi/01_Laporan_Keuangan/02_Soft_Copy_Laporan_Keuangan/Laporan%20Keuangan%20Tahun%202018/TW3/AMRT/AMRTLKTHWIII2018.pdf.

Nyoman Utari Vipriyanti, *Teori dan Aplikasi Ekonomi dan Kelembagaan Bagi Perencanaan Pembangunan*, <http://fp.unmas.ac.id/wp->

content/uploads/2018/03/Teori-dan-Aplikasi-Ekonomi-Kelembagaan-Bagi-Perencanaan-Pembangunan.pdf.

Peraturan.bphn.go.id, diakses pada 15 Oktober 2020 pada pukul 13.30
wita. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/42157/perpres-no-112-tahun2007#:~:text=PERPRES%20No.%20112%20Tahun%202007,Toko%20Modern%20%5BJDIH%20BPK%20RI%5D.>



L

A

M

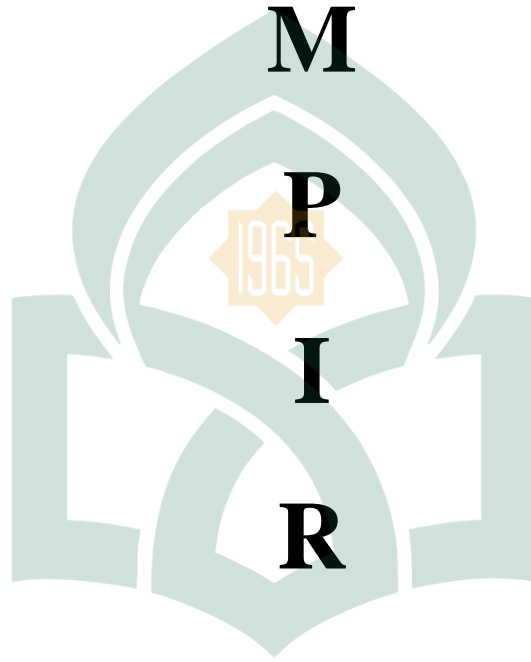
P

I

R

A

N



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

**Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2007 tentang
Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional Pusat Perbelanjaan dan Toko
Modern**

BAB I

Ketentuan Umum

Pasal 1

7. Pemasok adalah pelaku usaha yang secara teratur memasok barang kepada Toko Modern dengan tujuan untuk dijual kembali melalui kerjasama usaha
8. Usaha Kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang usaha kecil
9. Kemitraan adalah kerjasama usaha antara Usaha Kecil dengan Usaha Menengah dan Usaha besar disertai dengan pembinaan dan pengembangan oleh Usaha Menengah dan Usaha Besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan, sebagaimana dimaksud dalam peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan
10. Syarat Perdagangan (trading terms) adalah syarat-syarat dalam perjanjian kerjasama antara pemasok dan Toko Modern/Pengelola Jaringan Minimarket yang berhubungan dengan pemasok produk-produk yang diperdagangkan dalam Toko Modern yang bersangkutan



Wawancara dengan Bapak H. MUH. RAIS, S.Sos, M.Si
(Bidang perdagangan)



Wawancara dengan Ibu Hj. Kartini, ST
(Seksi Tertib Usaha dan Pendaftaran Perusahaan)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR



Wawancara dengan Pedagang Kecil



Wawancara dengan Pak Idwar dan Kak Jabenur
(Kepala Toko dan Sekretaris Toko Alfamart)



Situasi Toko Modern dan Toko Kecil

Daftar Riwayat Hidup



Milda Sari, hadir untuk pertama kalinya di dunia pada tanggal 11 Oktober 1996 di Tanjung Redeb Kabupaten Berau. Anak Kedua dari Lima bersaudara hasil buah kasih melalui pasangan suami-istri Sakka dan Tuti. Saya dibesarkan dari keluarga sederhana. Ayah bekerja sebagai Petani dan ibu urusan rumah tangga. Meskipun demikian semangat orang tua untuk tetap menyekolahkan anak-anaknya sangat tinggi. Hal ini menjadi motivasi tersendiri bagi penulis untuk mencapai cita-cita.

Penulis memulai pendidikan dari sekolah dasar di SD Negeri 001 Gunung Tabur, Berau lulus pada tahun 2009, setelah menyelesaikan pendidikan dasar penulis melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 4 Berau Kabupaten Berau dan menyelesaikan studinya pada tahun 2012, setelah lulus sekolah menengah pertama penulis melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 5 Berau dan berhasil menyelesaikan pendidikan pada tahun 2015. Setelah lulus sekolah menengah atas penulis melanjutkan pendidikannya di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar pada tahun 2015 dan Lulus di Jurusan Ilmu Politik pada Fakultas Ushuluddin, Filsafat, dan Politik.

Penulis pernah bergabung pada lembaga PMII kampus Uin Alauddin Makassar. Penulis menyadari bahwa mahasiswa adalah ujung tombak perubahan bangsa. Untuk mewujudkan itu mahasiswa tidak hanya mendapatkan ipk tinggi akan tetapi dapat mengembangkan kemampuan berorganisasi, kemampuan menjadi seorang pemimpin dan mengeluarkan pendapat didepan orang banyak. Dalam hal ini penulis dapat menggabungkan sisi akademik, organisasi dan pekerjaan menjadi satu. Sehingga dengan adanya manajemen waktu yang baik penulis berharap sebagian besar waktu penulis ketika menempuh pendidikan adalah dipenuhi dengan catatan kerja-kerja kemanusiaan sehingga dengan adanya pengalaman tersebut besar harapan penulis bisa menjadi bekal untuk menjadi salah satu penerus bangsa yang cerdas dan berintegritas tinggi.

Demikianlah daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya, atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.